



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur.
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2015.
10. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasionalisasi GDRB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RMRB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.

- (2) RMRB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
- a. acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Periode 2015-2019; dan
 - b. acuan SKPD di dalam menjalankan program prioritas dan rencana aksi dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.

Pasal 3

RMRB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RMRB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah sesuai masukan dan arahan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang 2015-2019 merupakan bentuk operasionalisasi dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan secara nasional. Dokumen ini memuat langkah-langkah konkrit dan sistematis dalam mengawal jalannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dokumen ini disusun setelah melalui tahapan-tahapan identifikasi permasalahan umum birokrasi, forum diskusi dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang mendalam dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disesuaikan dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi secara nasional, yang meliputi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, dan terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Secara umum, birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang telah dipandang telah memenuhi harapan masyarakat, seperti telah dicanangkannya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), serta perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata baik. Dari sisi peningkatan kualitas pelayanan publik, belum semua SKPD dan Unit Pelayanan yang ada melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu dokumen RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang 2015-2019 ini juga memuat fokus-fokus perubahan yang dijadikan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Dari hasil *skoring*, 3 (tiga) prioritas perubahan di pembenahan manajemen pemerintah daerah adalah sumber daya manusia (SDM), mental aparatur, dan pengawasan.

Dari sisi pembenahan SDM, Pemerintah Daerah bertekad untuk membenahi inventarisasi aset sehingga diharapkan opini BPK yang semula masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akan berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan dari sisi mental aparatur, Pemerintah Daerah akan memfokuskan pada perubahan pola pikir lama di bidang penganggaran, dimana pola pikir lama yang masih menekankan pada kinerja berbasis anggaran, akan diubah menjadi pola pikir anggaran berbasis kinerja. Selain itu, ke depan akan dilaksanakan berbagai sosialisasi terkait dengan aplikasi budaya kerja, misal dengan mengundang konsultan, dan menyelenggarakan lomba budaya kerja. Dari sisi pengawasan, pembenahan akan difokuskan pada penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset, dimana pola, sistem dan mekanismenya akan diubah dari sistem manual menjadi sistem berbasis IT sehingga seluruh sistem keuangan Pemerintah Daerah akan terintegrasi dalam SIMDA. Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan mengaktifkan Satgas SPIP untuk mempercepat peralihan opini BPK dari WDP menjadi WTP.

Selain langkah pembenahan manajemen perubahan di atas, Pemerintah Daerah juga akan tetap memelihara bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah dicapai selama ini, antara lain tetap mengupayakan agar seluruh PNS/ASN yang ada di lingkup Pemerintah Daerah untuk menandatangani Pakta Integritas, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya untuk mengurangi peluang terjadinya KKN.

Dari sisi pelayanan publik, Pemerintah Daerah akan tetap mengupayakan agar seluruh Unit Pelayanan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, di setiap SKPD diupayakan agar memiliki SOP, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD juga akan terus diupayakan, agar seluruh program kegiatan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat bisa dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discoussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan di Daerah, sektor strategis di bidang pelayanan publik yang menjadi prioritas meliputi 6 (enam) prioritas, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, trantibumlinmas, sosial, serta administrasi kependudukan dan perijinan.

Quick Wins yang dipilih adalah program/kegiatan yang sekiranya bisa dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Quick Wins* yang dipilih diantaranya adalah penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang, Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIPGan) *online*, pengembangan RSUD Tipe B, pengembangan Puskesmas menjadi RSUD Tipe D, dan sekolah unggul setiap jenjang pendidikan melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD, SMP, SMA, dan SMK.

Pemerintah Daerah berencana untuk menetapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sebagai SKPD yang melaksanakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBK), karena dipandang sebagai SKPD yang paling banyak memenuhi kriteria dan paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Fokus perubahan yang menjadi prioritas SKPD disesuaikan dengan program prioritas Bupati, diantaranya seperti pembiayaan pendidikan untuk penduduk miskin yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang dan Program ketepatan dan kecepatan pelayanan KTP, yang akan ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang.

Pada bagian akhir Bab III dituangkan rencana aksi yang memuat sasaran, program, kegiatan, indikator, tahapan, target tahunan, anggaran, serta SKPD penanggungjawabnya. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

RINGKASAN EKSEKUTIF	i - iii
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi	3
D. Pengertian	3
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	4
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah	4
B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan	6
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah	7
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	9
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	9
B. Sasaran	
C. Kegiatan-kegiatan	
D. Quick Wins	
E. Zona Integritas Menuju WBK/WBBK	
F. Rencana Aksi	
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring	
B. Evaluasi	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Delapan Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan
Tabel 3.2	Pioritas yang Harus Terus Dipelihara
Tabel 3.3	<i>Quick Wins</i>
Tabel 3.4	Daftar Prioritas SKPD
Tabel 3.5	Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah Area Sumber Daya Manusia
Tabel 3.6	Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah Area Mental Aparatur
Tabel 3.7	Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah Area Pengawasan
Tabel 3.8	Prioritas Pemeliharaan terhadap Hal-hal yang Sudah Baik Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Tabel 3.9	Prioritas Pemeliharaan terhadap Hal-hal yang Sudah Baik Sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien
Tabel 3.10	Prioritas Pemeliharaan terhadap Hal-hal yang Sudah Baik Sasaran Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
Tabel 3.11	Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Kesehatan
Tabel 3.12	Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Pendidikan
Tabel 3.13	Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Infrastruktur
Tabel 3.14	Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Trantibumlinmas
Tabel 3.15	Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Sosial
Tabel 3.16	Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Administrasi Kependudukan dan Perijinan
Tabel 3.17	Target <i>Quick Wins</i>
Tabel 3.18	Prioritas Satuan Perangkat Daerah
Tabel 3.19	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB). RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu tahun 2015 – 2019. Tujuan penyusunan RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Penyusunan RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Proses penyusunan RMRB ini telah dimulai sejak tahun 2012, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian mengalami perubahan pada substansinya pada tahun 2014 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dan pada akhirnya disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Secara umum RMRB Pemerintah Kabupaten Magelang berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Pada Road Map ini, jangka waktu berlakunya adalah 2015-2019, karena tahun 2014 merupakan tahun perencanaan, sehingga berbagai rencana aksi dimulai pada tahun 2015.

B. Tujuan

RMRB bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

C. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi.
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

D. Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Dokumen ini digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110°01'51"-110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13"-7°42'16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistematis dan sinergis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Magelang. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk *mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel*, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural, fungsional umum, dan fungsional tertentu di Pemerintah Kabupaten Magelang telah menandatangani Pakta Integritas.
2. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pejabat eselon II yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK.
3. Inspektorat secara rutin telah melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, dan hal ini didukung oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BPKP DIY, dan BPK untuk melakukan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Magelang.
4. Pengelolaan, sistem, prosedur dan tertib administrasi di bidang penganggaran sudah dilaksanakan melalui teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)/Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
5. Laporan realisasi anggaran melalui mekanisme Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali disertai dengan skoring yang bisa memacu kinerja keuangan SKPD.
6. Pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2012.
7. Telah ada kepastian dan transparansi biaya perizinan.
8. Telah menerapkan sistem e-Procurement atau membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
9. Telah disusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai wujud komitmen daerah dalam memerangi korupsi.
10. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kabupeten dan SKPD.
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Magelang adalah CC.

12. Inspektorat secara rutin telah melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada SKPD.
13. Inventarisasi aset daerah secara optimal.

Dalam kaitannya dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai *terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien*, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara transparan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*.
2. Telah diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
3. Telah melaksanakan penyusunan Evaluasi Jabatan.
4. Telah menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
5. Telah menerapkan Analisis Standar Biaya (ASB).
6. Telah melaksanakan evaluasi SOTK secara rutin.
7. Telah melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial/Teknis.
8. Telah menerapkan e-planning melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
9. Semua SKPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) administratif dan teknis.

Sementara dalam kaitan dengan *sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas*, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap tahun, dari hasil survei terhadap dua unit pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Magelang, rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah kategori baik, pada tahun 2014 diperoleh hasil survei IKM **76,084 (kategori baik)**. Selanjutnya, survei akan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap semua unit pelayanan yang ada di Kabupaten Magelang secara mandiri.
2. Seluruh urusan perizinan telah dilimpahkan kepada BPMPPT.
3. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk Kabupaten Magelang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
4. Memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 di bidang pendidikan pada beberapa sekolah di Kabupaten Magelang.
5. Pelayanan pembayaran pajak daerah secara online bekerjasama dengan pihak perbankan.
6. Pelayanan pembayaran 11 (sebelas) jenis pajak satu pintu.
7. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
8. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
9. Telah dicanangkannya PATEN untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.
10. Semua SKPD telah menyusun Standar Pelayanan (SP) yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD.
11. Telah melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Muntilan.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai tersebut di atas harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitannya dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, yaitu *mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel*, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Seluruh pegawai menandatangani pakta integritas setiap tahun.
2. Seluruh pejabat wajib LHKPN/LHKASN menyampaikan LHKPN/LHKASN.
3. Terbentuknya satuan tugas SPIP di setiap SKPD.
4. Tersusunnya Peraturan Bupati Magelang tentang Kode Etik PNS Kabupaten Magelang.
5. Penguatan peran APIP dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
6. Penetapan SKPD percontohan/pilot project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang.
7. Meningkatnya Nilai AKIP Kabupaten dari CC menjadi B.
8. Perlunya sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dokumen perencanaan dan anggaran.
9. Perlunya dilakukan re-evaluasi/appraisal asset/barang daerah secara berkala.
10. Pimpinan Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan *mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien*, antara lain:

1. Perlunya kajian tupoksi dan uraian tugas SKPD Kabupaten Magelang.
2. Penyempurnaan SOTK Pemerintah Kabupaten Magelang sesuai dengan kebutuhan.
3. Perlunya reviu data Analisis Jabatan secara mendalam, agar tugas pokok dan fungsi PNS benar-benar jelas, terukur, tidak tumpah tindih, dan sinergi dengan tupoksi di atasnya.
4. Diterapkannya sistem e-Government pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang.
5. Seluruh SKPD akan menerapkan penilaian kinerja berbasis IT.
6. Perlunya fasilitasi dalam rangka peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu.
7. Adanya Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Pemerintah Kabupaten Magelang.
8. Penerapan sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.
9. Perlunya perubahan pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang budaya melayani.
10. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan berdasarkan SOP.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan *mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas* adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan survei menyeluruh atas unit-unit pelayanan publik sebagai tindaklanjut atas nilai IKM/unsur-unsur pelayanan yang masih rendah.
2. Perlunya penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pendukung.
4. Penambahan jumlah beasiswa untuk siswa miskin berprestasi.
5. Dibentuknya media pengaduan on-line tingkat kabupaten terhadap seluruh pelayanan dasar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Magelang, yang dapat diakses secara mudah, cepat dan transparan.
6. Peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
7. Peningkatan kualitas pelayanan, kapasitas, sarana dan prasarana di RSUD maupun Puskesmas.
8. Integrasi Program Jamkesda ke dalam BPJS.
9. Tertanganinya jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan.
10. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air untuk kebutuhan air bersih dan irigasi.
11. Tertatanya bangunan dan lingkungan permukiman.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya *mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel*, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Inventarisasi aset yang masih terkendala dengan administrasi dan penelusuran aset. Hal ini berimplikasi pada opini BPK yang masih WDP.
2. Pejabat wajib LHKPN belum semuanya memahami metode pengisian LHKPN
3. Pola pikir pengelola anggaran belum berorientasi pada kinerja, sehingga masih berpijak pada pola lama seperti anggapan suatu program/kegiatan dianggap berhasil apabila serapan anggarannya mencapai 100 persen. Hal ini menyebabkan mereka berlomba-lomba menghabiskan anggaran dengan berbagai cara, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi/penyimpangan.
4. Masih banyak pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya.
5. Masyarakat menilai bahwa masih banyak PNS yang menggunakan jam kerjanya untuk kegiatan lain.
6. Diklat untuk menunjang pekerjaan dirasa masih kurang.
7. Belum dipahami sepenuhnya bahwa LAKIP/LKjIP merupakan dokumen yang bisa dijadikan rapor/laporan kinerja pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat, yang menekankan evaluasi dan analisis kinerja, bukan sekedar laporan kegiatan/program.
8. Masih lemahnya sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah (SPIP).

Dalam kaitan dengan *mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien*, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. PNS yang ditugaskan terutama di Unit Pelayanan dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya berorientasi kepada kepuasan masyarakat.
2. Kurangnya personil pada unit pelayanan publik, seperti bidang pelayanan perizinan.
3. Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya.
4. Pola pikir pengelola anggaran belum berorientasi pada kinerja
5. Masih terdapatnya ketimpangan komposisi dan jumlah pegawai dengan beban kerja yang dihadapi.
6. Dokumen Pola Hubungan kerja belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Belum seluruh pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu memahami uraian tugas jabatan.
8. Adanya pembinaan karier dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
9. Masih terdapat pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah.
10. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum dipahami secara luas.
11. Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah belum lancar.
12. Masih adanya pimpinan Perangkat Daerah yang belum definitif.

Sementara dalam kaitan dengan *mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas*, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Unit Pelayanan belum memahami pentingnya Indeks Kepuasan Konsumen (IKM), sehingga belum optimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Masyarakat memandang bahwa birokrasi kepengurusan KTP/KK rumit.
4. Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan masih lamban dan berbelit-belit.
5. Sarana aduan belum dikelola secara baik dan transparan.

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi memuat 8 (delapan) area perubahan dengan hasil yang diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Delapan Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan

No	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
1.	Mental Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan segenap aparatur di Pemerintah Kabupaten Magelang. b. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap SKPD/unit kerja. c. Meningkatnya integritas aparatur di setiap SKPD/unit kerja. d. Meningkatnya profesionalisme aparatur. e. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat. f. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kapasitas APIP. b. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. c. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. d. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi. e. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur. f. Memperoleh opini WTP dari BPK.
3.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan - 8 - iker- 8 -- 8 -ional. c. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang. d. Meningkatnya akuntabilitas aparatur.
4.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang. b. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Magelang. c. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar SKPD/Unit Kerja. d. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antar perangkat daerah. e. Meningkatnya sinergisme kelembagaan antar perangkat daerah.

No	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
		f. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing perangkat daerah. g. Meningkatnya kinerja aparatur.
5.	Tatalaksana	a. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i> . b. Meningkatnya kualitas tata hubungan antar perangkat daerah. c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik. d. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. e. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal. f. Meningkatnya kualitas pelayanan.
6.	Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara	a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif. b. Meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis <i>merit</i> . c. Meningkatnya jumlah SKPD yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur. d. Mewujudkan SKPD yang membentuk <i>talent pool</i> (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya. e. Mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi. f. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan. g. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem <i>merit</i> dalam Manajemen SDM aparatur. h. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
7.	Peraturan Perundang-Undangan	a. Meningkatnya keterlibatan pulik dalam proses perumusan kebijakan di daerah. b. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
8.	Pelayanan Publik	a. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik. b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. c. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada 4 (empat) - 9 - iker perubahan yaitu Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN), mental aparatur, pengawasan, dan pelayanan - 9 - iker- 9 -. Sedangkan 4 (empat) area perubahan yang lain, yaitu akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan dimasukkan ke dalam prioritas yang harus terus dipelihara.

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Kabupaten

Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN)

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Pengelola barang/aset sebagian besar belum memahami aturan/regulasi terkait penatausahaan barang/aset yang berimplikasi pada belum diraihnya opini WTP dari BPK.
- 2) Pejabat yang wajib mengisi LHKPN sebagian besar belum memahami pengisian dokumen tersebut.
- 3) Pimpinan di SKPD belum memahami sepenuhnya arti pentingnya LAKIP/LKjIP, sehingga proses penyusunannya tidak dikawal dengan baik.
- 4) Pemahaman budaya melayani belum tertanam pada seluruh PNS.
- 5) Penataan, kuantitas, kualitas, dan komposisi pegawai pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang belum sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- 6) Peraturan Bupati tentang Kode Etik PNS Kabupaten Magelang belum disusun.
- 7) Sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai belum diterapkan.
- 8) Peran Satgas SPIP belum optimal.
- 9) Pengisian jabatan pada formasi jabatan yang kosong belum dilaksanakan.

b. Mental Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Pola pikir para pengelola anggaran belum berorientasi pada pelaporan kinerja.
- 2) Para PNS yang bertugas di Unit Pelayanan Publik, di dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat belum semuanya berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 3) Pemerintah belum mengaplikasikan manajemen kinerja secara sempurna.
- 4) Pemberian penghargaan/insentif belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja dan kompetensi.

c. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Peran APIP belum kuat.
- 2) Jumlah pemeriksa terbatas sehingga capaian obyek pemeriksaan belum ke semua unit kerja secara rutin.
- 3) Pola - 10 - iker (mind set) pengawasan belum bergeser dari watch dog ke early warning.
- 4) Opini WTP dari BPK belum berhasil diraih.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaharui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik dibedakan berdasarkan 4 (empat) area perubahan yang tidak masuk ke dalam Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Kabupaten dan Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu antara lain:

Tabel 3.2
Prioritas yang harus terus Dipelihara

No	Area Perubahan	Prioritas yang harus terus dipelihara
1.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh pejabat struktural sudah menandatangani Pakta Integritas, hal ini harus terus dipelihara, dan ditingkatkan kualitasnya. b. Seluruh pejabat Struktural Eselon II telah menyampaikan LHKPN. c. Telah diterbitkannya Jamkesda. d. Telah diterapkan Analisa Standar Biaya (ASB). e. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai wujud komitmen daerah dalam memerangi korupsi. f. Inventarisasi dan re-evaluasi asset daerah.
2.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilaksanakan evaluasi SOTK secara rutin. b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
3.	Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-Procurement</i> telah dilaksanakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. b. Rata-rata nilai IKM baik. c. Seluruh perijinan telah dilimpahkan dalam BPMPT. d. Sebanyak 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) urusan SPM telah disiapkan untuk diperbupkan. e. Telah diterapkan SIMPEG. f. Terwujudnya pengembangan system informasi manajemen.
4.	Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan perkara non litigasi dan litigasi. b. Pengembangan <i>website</i> JDIH. c. Kajian dan evaluasi Perda dan Perbup secara kontinyu.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

- a. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1) Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang karena sangat menunjang aktivitas setiap manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Pelayanan publik bidang kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan publik pemerintah, karena :

- Sektor kesehatan merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Bertambahnya jumlah penduduk akan berkontribusi pada peningkatan pembiayaan sektor kesehatan;
- Kesehatan merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan seseorang;

- Adanya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan.

Berpijak dari hal tersebut maka sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Magelang. Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- Pengembangan RSUD Muntilan menjadi rumah sakit tipe B, dengan bangunan dan lahan baru yang lebih strategis dan memenuhi standar;
- Pengembangan Puskesmas menjadi Pusat Layanan Kesehatan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pada tahun 2015 seluruh Puskesmas telah menjadi Puskesmas BLUD; Status Puskesmas Rawat Inap Salaman I dan Grabag I menjadi Rumah Sakit Kelas D;
- Penambahan Puskesmas Rawat Inap dari 3 Puskesmas menjadi 9 Puskesmas;
- Penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat;
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang kesehatan;
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Kabupaten Magelang;
- Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survey kepuasan di bidang kesehatan;
- Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan;
- Optimalisasi integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS;
- Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS).

2) Sektor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena dari sanalah kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).

Berpijak dari hal tersebut maka sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Magelang. Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- Pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program wajib belajar Sembilan tahun dengan bantuan operasional daerah (BOSDA), biaya penyelenggaraan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK.
- Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD, SMP (2.035 ruang) melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, swasta (DAK 2014), peningkatan mutu sarpras pendidikan SD/SMP Negeri/Swasta.
- Pelaksanaan rintisan Wajib Belajar 12 tahun melalui pemberian beasiswa siswa SD/SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C.

- Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD/SMP maupun SMA/SMK.
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimtek Peningkatan Guru Kelas, Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel.
- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini melalui bantuan pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD (Bangub).
- Peningkatan layanan mutu pembinaan pemuda dan olahraga.
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pendidikan.
- Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang pendidikan.

3) Sektor Infrastruktur (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman)

Infrastruktur yang memadai, secara kuantitas maupun kualitas, merupakan prasyarat yang mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mewujudkan pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelaku utama, berperan sebagai fasilitator dalam merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur sebagai penggerak pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (*pro-growth*), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (*pro-job*), dan mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*).

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang diarahkan untuk:

- Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jalan di kawasan perbatasan;
- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;
- Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan kepada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri;
- Mengurangi luasan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan;
- Meningkatkan lingkungan perumahan yang sehat;
- Meningkatkan cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;

Sedangkan strategi di bidang infrastruktur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- Melaksanakan penanganan jalan dan jembatan (kabupaten dan desa);
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air irigasi;
- Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan perumahan, permukiman perdesaan dan perkotaan.

4) Sektor Trantibumlinmas

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan, dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ini, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki arahan sebagai berikut :

- 1) Mengurangi angka pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 2) Menurunkan angka kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam masyarakat;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Meningkatkan kapabilitas anggota Satpol PP dan mewujudkan PPNS dari Satpol PP;
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana untuk mendukung kinerja aparat Satpol PP.

Sedangkan strategi dan kebijakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1) Meningkatkan iklim yang kondusif melalui deteksi dini, peta rawan tramtib, dan pengamanan terpadu;
- 2) Meningkatkan sinergi cegah tangkal gangguan tramtibum;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memelihara ketertiban, ketenteraman dan keamanan melalui pembentukan kader siaga tramtib di kelurahan/desa, forum komunikasi dan sarasehan;
- 4) Meningkatkan penegakan produk hukum daerah;
- 5) Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan, serta meningkatkan kerja sama antar daerah;
- 6) Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana operasional.

5) Sektor Sosial

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, atau dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah Kabupaten Magelang masih memiliki permasalahan di bidang sosial sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya penanganan PMKS;
- 2) Belum optimalnya penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki strategi selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi jumlah PMKS;
- 2) Meningkatkan kualitas PSKS.

6) Sektor Administrasi Kependudukan dan Perizinan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, untuk menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan.

Bidang administrasi kependudukan masih menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang terkait dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan;

- 2) Masih terbatasnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi Kependudukan;
- 3) Masih belum optimalnya pengelolaan arsip/dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Belum mencukupinya ketersediaan blanko Akta Catatan Sipil Administrasi Kependudukan jika dibandingkan jumlah permohonan dari masyarakat.

Di bidang perizinan, peningkatan kualitas di bidang perizinan merupakan keniscayaan, dimana masyarakat menuntut adanya kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam pengurusan segala hal bentuk perizinan. Secara garis besar bidang perizinan masih menghadapi kendala sebagai berikut:

- 1) Dari sisi penyelenggaraannya, masih ditemui beberapa kelemahan, antara lain kurang responsif, kurang informatif (kepastian jadwal pelayanan), kurang *accessible*, kurang koordinatif, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, kurang cepat, kurang nyaman, lemahnya regulasi pelayanan perizinan, kurangnya promosi peluang investasi, belum diterapkannya aplikasi perizinan secara *online*, dan inefisien;
- 2) Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utama pelayanan publik oleh pemerintah adalah tentang kurangnya profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, kompetensi, empati dan etika. Salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan/ peningkatan mutu pelayanan publik adalah masalah sistem remunerasi (penggajian) yang sesuai bagi birokrat.
- 3) Kelemahan utama kelembagaan birokrasi pemerintah terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan optimal, tetapi justru hirarkis, sehingga membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat dominan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD antara lain :

- 1) Optimalisasi kelembagaan lembaga yang menangani pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 3) Identifikasi jenis-jenis perizinan yang akan dilimpahkan ke lembaga yang menangani pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka *one stop one service*;
- 4) Pelayanan penyusunan adminduk, capil dan perizinan keliling;
- 5) Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang perizinan;
- 6) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan;
- 7) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 8) Perumusan dan penguatan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
- 9) Peningkatan plafon anggaran untuk kegiatan promosi peluang investasi;

10) Peningkatan partisipasi aktif dalam forum kerja sama dengan dunia usaha.

b. *Quick Wins*

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan:

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Magelang;
- 3) Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Quick Wins

No	Quick Wins	SKPD Penanggungjawab	Target
1.	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang	Setda	2015
2.	Aplikasi PATEN di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang	Setda	2015
3.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural	Setda	2015
4.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional	Setda	2015
5.	Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Setda	2015
6.	Pelaksanaan Monev <i>online</i> dengan aplikasi SIMONEVA untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan dan fisik APBD	Setda	2015
7.	Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIPGan) <i>online</i>	BKD	2015
8.	Pengembangan RSUD Tipe B	Dinas Kesehatan	2019
9.	Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D	Dinas Kesehatan	2019
10.	Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD/SMP maupun SMA/SMK.	Disdikpora	2016
11.	Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD/SMP.	Disdikpora	2016
12.	Pembangunan TPA	DPU dan ESDM	2019
13.	Penghapusan denda/sanksi keterlambatan pengurusan Akte Kelahiran	Disdukcapil	2018
14.	Penuntasan perekaman e-KTP dengan metode jemput bola	Disdukcapil	2015
15.	Pembangunan gedung kantor BPPPT	BPPPT	2017

No	Quick Wins	SKPD Penanggungjawab	Target
16.	Migrasi Aplikasi SIPKD ke Simda Keuangan	DPPKAD	2015
17.	Pelayanan Pendapatan Daerah	DPPKAD	2015
18.	Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	DPPKAD	2015
19.	Pengadaan Tanah PKL	DPPKAD	2015
20.	Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	DPPKAD	2015

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Magelang telah mencanangkan Zona Integritas, yang penancangannya dilaksanakan serentak pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2014 di Semarang. Sebagai tindak lanjut dari penancangan tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Unit Penggerak Integritas (*Inspektorat*) bersama instansi terkait **diharapkan** dapat menunjuk dan melakukan pembinaan lebih fokus kepada SKPD yang akan dijadikan sebagai **percontohan WBK/WBBM** dilingkungan Pemerintah Kota Magelang. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

Sebagai percontohan WBK/WBBM di pemerintah Kabupaten Magelang adalah Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPPT), karena selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dinas ini memberikan pelayanan perizinan secara langsung kepada masyarakat.

5. Prioritas SKPD

Prioritas SKPD merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Magelang. Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Prioritas-prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

Tabel 3.4
Daftar Prioritas SKPD

No	Prioritas	SKPD	Target
1.	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) SKPD yang didalamnya meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Maklumat/Janji Layanan.	Setda	2015

No	Prioritas	SKPD	Target
2.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural dan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional	Setda	2015
3.	Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Setda	2015
4.	Pelaksanaan Monev <i>online</i> , untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan dan fisik APBD	Setda	2015
5.	Beasiswa Siswa Berprestasi SD, SMP dan SMA	Disdikpora	2015-2019
6.	Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan	DPU dan ESDM	2016-2019
7.	Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil	Disdukcapil	2015
8.	Penyusunan regulasi di bidang Penanaman Modal	BPMPT	2015-2019
9.	Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan	2015-2019
10.	Jaminan Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	2015-2019
11.	Pengembangan sarana dan prasarana bidang kesehatan di BLUD RSUD Muntilan dan Puskesmas se Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan	2015-2019
12.	Aplikasi PATEN di seluruh kecamatan se Kabupaten Magelang	Setda	2015-2019
13.	Revisi Perda PPNS	Satpol PP	2016
14.	Pembangunan Panti Asuhan Pemerintah	Disnakersostrans	2018
15.	Penegakan Perda dan Perbup	Satpol PP	2015-2019
16.	Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) di setiap desa	Satpol PP	2015-2019
17.	Alih Digital Arsip Kependudukan	Disdukcapil	2015-2019
18.	Pembangunan Data Center SIAK dan e-KTP pada Disdukcapil	Disdukcapil	2015-2019
19.	Pelayanan administrasi kependudukan melalui Mobil Keliling	Disdukcapil	2015-2019
20.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Lelang Jabatan	BKD	2017-2019
21.	Peningkatan kapasitas pejabat struktural melalui Diklatpim	BKD	2015-2019
22.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD	2015-2019
23.	Reses (tatap muka dengan masyarakat)	Sekretariat DPRD	2015-2019
24.	Peningkatan kapasitas petani/peternak dan pengusaha di bidang pertanian/peternakan	BPPKP	2016-2019
25.	Pengembangan pertanian organic	BPPKP	2016-2019
26.	Peningkatan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan	BPPKP	2015-2019
27.	Pengembangan itik kalung sebagai ternak khas dari Kabupaten Magelang	Dispeterikan	2015-2019
28.	Menjadikan Kabupaten Magelang sebagai Sentra Benih Ikan	Dispeterikan	2015-2019
29.	Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Perhubungan di wilayah Kabupaten Magelang	Dinas Perhubungan	2015-2019

No	Prioritas	SKPD	Target
30.	Penanganan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Bapermaspuan dan KB	2015-2019
31.	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Bapermaspuan dan KB	2015-2019
32.	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Bapermaspuan dan KB	2015-2019
33.	Penyampaian Informasi pembangunan kepada masyarakat	Diskominfo	2015-2019
34.	Meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Magelang	Disparbud	2015-2019
35.	Pengiriman delegasi kesenian sebagai bagian dari promosi wisata	Disparbud	2015-2019
36.	Penataan Struktur Industri di Kabupaten Magelang	Disperinkop dan UMKM	2015-2019
37.	Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Distanbunhut	2015-2019
38.	Peningkatan jumlah pasar dengan kategori baik di Kabupaten Magelang	Disdagsar	2015-2019
39.	Penataan PKL khususnya di kawasan Muntilan, Mertoyudan, Secang, Grabag, dan Salaman	Disdagsar	2015-2019
40.	Diraiknya Adipura Kota Muntilan	Badan Lingkungan Hidup	2015-2019
41.	Program Menabung Air	Badan Lingkungan Hidup	2015-2019
42.	Pengelolaan Limbah padat, cair, dan udara	Badan Lingkungan Hidup	2015-2019
43.	Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal	Kantor Kesbangpol	2015-2019
44.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kantor Kesbangpol	2015-2019
45.	Meningkatkan pemahaman politik di masyarakat	Kantor Kesbangpol	2015-2019
46.	Peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2015-2019
47.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2015-2019
48.	Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	2015-2019
49.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2015-2019
50.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan statistik	BAPPEDA	2015-2019

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan tersebut.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara, dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah a. Sumber Daya Manusia

Tabel 3.5
Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah
Area Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya pemahaman pengurus dan penyimpan barang terhadap aturan/regulasi terkait penatausahaan barang/aset.	Jumlah SKPD yang tervalidasi inventaris asetnya Persentase petugas pengurus/pemeliharaan barang yang di bimtek	53 100 %	53 100 %	53 100 %	53 100 %	53 100 %
2.	Meningkatnya pemahaman pejabat yang wajib mengisi dokumen LHKPN/LHKASN	Persentase pejabat wajib LHKPN/LHKASN yang menyampaikan laporannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya pemahaman terhadap kualitas pelaporan LAKIP/LKjIP	Persentase SKPD yang nilai LAKIP/LKjIPnya CC	5%	10%	15%	30%	35%
4.	Meningkatnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS	Persentase PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja	-	0,60 %	1,00 %	1,20 %	1,50 %
5.	Meningkatnya penataan, kuantitas, kualitas, dan komposisi pegawai pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang yang sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Persentase penataan, kuantitas, kualitas, dan komposisi pegawai pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang yang sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Tersusunnya Peraturan Bupati Magelang tentang Kode Etik PNS Kabupaten Magelang	Peraturan Bupati Magelang tentang Kode Etik PNS Kabupaten Magelang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Terwujudnya Penerapan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.	Laporan Implementasi Sistem Pola Karier	-	-	-	-	Ada
8.	Meningkatnya peran Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tingkat Kabupaten Magelang dan Tingkat SKPD	Leveling Maturitas SPIP	Rintisan	Intuitif	Intuitif	Intuitif	Terdefinisikan
9.	Pengisian jabatan pada formasi jabatan yang masih kosong.	Persentase pengisian jabatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

b. Mental Aparatur

Tabel 3.6
Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah
Area Mental Aparatur

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya pemahaman para pengelola anggaran yang berorientasi pelaporan kinerja	Persentase pengelola anggaran yang telah didiklatkan DPPKAD	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
2.	Terwujudnya aparatur PNS yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja	0,1%	0,2%	0,63 %	1,00 %	1,50 %
3.	Teraplikasikannya manajemen kinerja secara sempurna oleh Pemerintah Kabupaten	Monitoring Implementasi SAKIP	-	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Terwujudnya pemberian penghargaan/insentif berdasarkan kinerja	Pemberian penghargaan/insentif berdasarkan kinerja	-	-	Ada	Ada	Ada

c. Pengawasan

Tabel 3.7
Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah
Area Pengawasan

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya penguatan peran APIP	Jumlah pembentukan dan peningkatan jejang Auditor	29	32	34	36	41
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa	Persentase aparat pengawasan yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya <i>mindset early warning</i> di bidang pengawasan	Cakupan pengawasan dan pengendalian kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Diraihnya opini WTP dari BPK	Opini WTP dari BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

2. Prioritas Pemeliharaan terhadap Hal-hal yang Sudah Baik
a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Tabel 3.8
Prioritas Pemeliharaan terhadap Hal-hal yang Sudah Baik
Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Dokumen Pakta Integritas seluruh Pejabat Struktural	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyampaian LHKPN/LHKASN oleh seluruh Pejabat Eselon II di Kabupaten Magelang	Laporan LHKPN dari seluruh Pejabat Eselon II	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya mekanisme pengadaan barang dan jasa yang transparan melalui <i>e-Procurement</i>	<i>e-Procurement</i> terselenggara dengan baik	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh

4.	Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Magelang yang bersih dari korupsi	RAD-PPK Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
5.	Terlaksananya inventarisasi dan Re-evaluasi Aset Daerah	Data Inventaris Aset sesuai dengan Neraca	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

b. Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Tabel 3.9
Prioritas Pemeliharaan terhadap Hal-hal yang Sudah Baik
Sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya struktur organisasi yang <i>right sizing</i>	Perda dan Perbup tentang SOTK	-	5 Perda/Perbup	-	-	-
2.	Terwujudnya mekanisme perencanaan penganggaran yang efektif, efisien dan ekonomis melalui penerapan Analisis Standar Biaya (ASB)	Penerapan sistem perencanaan penganggaran berbasis ASB	-	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh
3.	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian yang cepat, akurat, transparan, dan kredibel	Aplikasi SIMPEG	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pengembangan sistem informasi manajemen	Persentase SKPD yang telah menerapkan <i>e-Government</i>	70%	75%	80%	85%	90%
5.	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

c. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Tabel 3.10
Prioritas Pemeliharaan terhadap Hal-hal yang Sudah Baik
Sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tercapainya rata-rata nilai IKM baik diseluruh Unit Pelayanan Publik dan SKPD	Persentase rata-rata peningkatan nilai IKM	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	Terwujudnya tata kelola perijinan satu atap dan satu pintu	Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Perijinan ke BPMPT	-	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jamkesmas	Jamkesda bagi warga masyarakat miskin yang tidak memiliki Jamkesmas	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan di seluruh kecamatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN di kecamatan	-	Ada	Ada	Ada	Ada

3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.1. Pelayanan Sektor Strategis

3.1.1. Sektor Kesehatan

Tabel 3.11
Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Kesehatan

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya status RSUD Muntilan menjadi RSUD tipe B	Status RSUD Muntilan tipe B	-	-	-	-	1 RS Tipe B
2.	Meningkatnya status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	PPK BLUD	29	29	29	29	29
3.	Bertambahnya Puskesmas Rawat Inap dari 3 Puskesmas menjadi 9 Puskesmas	Jumlah penambahan Puskesmas Rawat Inap yang baru	3	3	5	7	9
4.	Tersebarnya informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat	Informasi kesehatan pada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang kesehatan	SOP bidang kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan di Kabupaten Magelang	Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti Bimtek sesuai dengan kompetensinya	100%	100%	100 %	100 %	100%
7.	Optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan Standar Pelayanan (SP), SOP, Maklumat/Janji Layanan, dan survey kepuasan di bidang kesehatan	Cakupan kegiatan yang melibatkan masyarakat	100%	100%	100 %	100 %	100%
8.	Optimalnya sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	-	-	100 %	100 %	100%
9.	Optimalnya integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS	Jamkesda yang terintegrasi dalam BPJS	-	-	-	Taha p I	Tahap II
10.	Optimalnya penerapan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	Persentase Puskesmas yang menerapkan SIMPUS	100%	100%	100 %	100 %	100%

3.1.2. Sektor Pendidikan

Tabel 3.12
Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Pendidikan

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program wajib belajar Sembilan tahun dengan bantuan operasional daerah (BOSDA), biaya penyelenggaraan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK.	Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa	3.375 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa
2.	Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD, SMP	Persentase ruang kelas kategori baik	85,72	87,14	88,57	90,00	91,43

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	(2.035 ruang) melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, swasta (DAK 2014), peningkatan mutu sarpras pendidikan SD/SMP Negeri/Swasta.	(memenuhi SNI) (Persen)					
3.	Terlaksananya rintisan Wajib Belajar 12 tahun melalui pemberian beasiswa siswa SD/SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C.	APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C	102,3 4	102,1 4	101,0 4	101,9 4	101,8 4
			95,56	96,06	95,56	97,06	97,56
			69,70	71,10	73,40	75,10	80,00
			95,49	95,89	96,09	96,79	97,09
			78,90	79,95	80,85	81,96	82,65
			55,56	58,06	51,56	64,06	66,56
4.	Terwujudnya sekolah unggul pada setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD/SMP maupun SMA/SMK.	Jumlah Sekolah Unggulan	-	21 SD, 6 SMP	-	-	-
5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimtek Peningkatan Guru Kelas, Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (Persen)	83	84	85	86	88
6.	Meningkatnya layanan PAUD bantuan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)	APK PAUD	53,93	54,08	54,23	54,39	54,54
7.	Meningkatnya layanan mutu pembinaan pemuda dan olahraga.	Cakupan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pendidikan	SOP Bidang Pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Optimalnya system dan mekanisme pengaduan di bidang pendidikan	Persentase penanganan pengaduan di bidang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%

3.1.3. Sektor Infrastruktur

Tabel 3.13
Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Infrastruktur

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan (kabupaten dan desa)	- Persentase jalan dalam kondisi baik (Persen)	68,53	69,01	69,25	69,49	69,73
2.	Optimalnya pengelolaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air irigasi	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Persen)	58,16	60,02	62,72	64,62	67,42
3.	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan	Persentase permukiman kumuh (Persen)	2,79	2,75	2,55	2,50	2,45
4.	Optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Magelang	Persentase sampah yang tertangani (Persen)	23	25	27	29	31

3.1.4. Sektor Trantibumlinmas

Tabel 3.14
Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Trantibumlinmas

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya penegakan hukum di daerah	Persentase pelanggaran hukum di daerah	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Angka kriminalitas	2,51	2,32	2,13	1,82	1,62
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketenterama, dan keamanan	- Rasio Linmas - Jumlah kader siaga Trantib	95,54 216	96,77 216	98,41 405	99,64 540	100,87 605
4.	Meningkatnya kapasitas aparaturnya SatpolPP yang kompeten dan profesional	Frekuensi Pelatihan Satpol PP	6 x	9 x	9 x	9 x	9 x
5.	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di Satpol PP	Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tersusunnya revisi Perda tentang PPNS	Revisi Perda tentang PPNS	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh

3.1.5. Sektor Sosial

Tabel 3.15
Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Sosial

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Berkurangnya jumlah PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	15,4	16,4	17,4	18,5	20,0
2.	Meningkatnya kualitas PSKS	Persentase PSKS yang layak	100%	100%	100%	100%	100%

3.1.6. Sektor Administrasi Kependudukan dan Perizinan

Tabel 3.16
Pelayanan Sektor Strategis : Sektor Administrasi Kependudukan dan Perizinan

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Optimalnya kelembagaan lembaga yang menangani perizinan	Laporan Evaluasi dan Kajian SOTK BPMPTT (Regulasi Pelimpahan wewenang perizinan)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusunnya SP dan SOP pelayanan bidang perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil	SP dan SOP pelayanan bidang perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terwujudnya pelayanan penyusunan adminduk, capil dan perizinan keliling	Pengadaan mobil operasional adminduk	1 Mobil	-	-	-	-
4.	Meningkatnya Standar Pelayanan Mutu di bidang perizinan	Aplikasi SIM-PAP PM dan SPIPISE	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh
5.	Optimalnya sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Kenaikan Realisasi PMDN (Milyar)	180	116	254	164	359
7.	Terwujudnya perumusan dan penguatan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim	Perda tentang Penanaman Modal	-	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	penanaman modal						
8.	Meningkatnya plafon anggaran untuk kegiatan promosi peluang investasi	Frekuensi kegiatan promosi peluang investasi	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x
9.	Meningkatnya partisipasi aktif BPPPT dalam forum kerja sama dengan dunia usaha	- Fasilitas dan kerjasama kemitraan usaha (pelaku) - Rating Pemda Pro Investasi	50	50	50	50	50
			-	1 x	-	1 x	-

3.2. Quick Wins

Tabel 3.17
Quick Wins

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang.	Dokumen SP pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang	100%	-	-	-	-
2.	Aplikasi PATEN di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.	21 kecamatan menerapkan PATEN	100%	-	-	-	-
3.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural	Dokumen Evaluasi Jabatan Struktural	1 Dok	-	-	-	-
4.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional	1 Dok	-	-	-	-
5.	Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).	Perbup tentang TNDE	Perbup TNDE	-	-	-	-
6.	Pelaksanaan Monev <i>online</i> , untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan dan fisik APBD.	Aplikasi SIMONEVA	1 Aplikasi	-	-	-	-
7.	Sistem Informasi Manajemen (Sistem Informasi Kepegawaian (SIPGAN) <i>online</i> .	Aplikasi SIPGAN <i>online</i>	1 Aplikasi	-	-	-	-
8.	Pengembangan RSUD Tipe B	RSUD Tipe B	-	-	-	-	Tipe B
9.	Pengembangan Puskesmas menjadi RSUD Tipe D	RSUD Tipe D	-	-	-	-	Tipe D
10.	Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD/SMP maupun SMA/SMK.	Jumlah Sekolah Unggul Berbagai Tingkatan	-	21 SD, 8 SMP,	-	-	-
11.	Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD, SMP sejumlah 2.035 ruang.	Jumlah ruang kelas yang diperbaiki	-	2.035 ruang	-	-	-
12.	Pembangunan TPA	TPA Regional	-	-	-	-	TPA
13.	Penghapusan denda/sanksi keterlambatan pengurusan Akte Kelahiran	Akte Kelahiran yang dikenakan denda	-	-	-	0%	-
14.	Penuntasan Perekaman e-KTP dengan metode jemput bola	Jumlah jiwa yang direkam KTP nya	-	5.000 jiwa	-	-	-
15.	Pembangunan gedung kantor BPPPT	Gedung Kantor BPPPT	-	-	1 Gedung	-	-
16.	Migrasi Aplikasi SIPKD ke Simda Keuangan	Aplikasi SIMDA	Aktif	-	-	-	-
17.	Pelayanan Pendapatan Daerah	Pelayanan Pendapatan Daerah Aktif	Aktif	-	-	-	-
18.	Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbup tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Perbup	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
19.	Pengadaan Tanah PKL	Tanah PKL	1 bidang tanah	-	-	-	-
20.	Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Aplikasi SIMDADA	Aktif	-	-	-	-

4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tabel 3.18
Prioritas Satuan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) SKPD yang didalamnya meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Maklumat/Janji Layanan.	Dokumen SP SKPD	100%	-	-	-	-
2.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Fungsional dan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional.	Dokumen Evaluasi Jabatan Fungsional dan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional.	2 Dok	-	-	-	-
3.	Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).	Perbup tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).	1 Perbup	-	-	-	-
4.	Pelaksanaan Monev online, untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan dan fisik APBD.	Aplikasi SIMONEVA	1 Aplikasi	-	-	-	-
5.	Beasiswa Siswa Berprestasi SD, SMP dan SMA	Jumlah siswa berprestasi SD, SMP dan SMA yang memperoleh beasiswa	3.375	4.060	4.060	4.060	4.060
6.	Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan	Luasan lingkungan permukiman perdesaan yang ditata	-	16%	19%	22%	28%
7.	Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil	Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil.	1 Perbup	-	-	-	-
8.	Penyusunan regulasi di bidang Penanaman Modal	Regulasi Bidang Penanaman Modal	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft
9.	Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Kartu Jamkesda bagi masyarakat miskin	178.894	178.894	178.894	178.894	178.894
10.	Jaminan Kesehatan Khusus	Jumlah warga yang memperoleh Jaminan Kesehatan Khusus	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276
11.	Pengembangan sarana dan prasarana bidang kesehatan di BLUD RSUD Muntilan dan Puskesmas se Kabupaten Magelang	Cakupan sarana dan prasarana bidang kesehatan di BLUD RSUD Muntilan dan Puskesmas se Kabupaten Magelang (Persen)	100	100	100	100	100
12.	Aplikasi PATEN di seluruh kecamatan se Kabupaten Magelang	Aplikasi PATEN di seluruh kecamatan se Kabupaten Magelang (Persen)	100	100	100	100	100
13.	Revisi Perda PPNS	Perda PPNS	-	1 Perda	-	-	-
14.	Pembangunan Panti Asuhan Pemerintah	Panti Asuhan Pemerintah	-	-	-	1 Panti	-
15.	Penegakan Perda dan Perbup	Frekuensi Penegakan Perda dan Perbup (kali)	200	225	250	275	300
16.	Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) di setiap desa	Jumlah KST	216	216	405	540	675
17.	Alih Digital Arsip Kependudukan	Aplikasi Alih Digital Arsip Kependudukan	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
18.	Pembangunan Data Center SIAK dan e-KTP pada Disdukcapil	Data Center SIAK dan e-KTP	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
19.	Pelayanan administrasi kependudukan melalui Mobil Keliling	Pelayanan menggunakan mobil keliling	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
20.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Lelang Jabatan	Lelang Jabatan	-	-	Sudah	Sudah	Sudah
21.	Peningkatan kapasitas pejabat - 28 -omestic- 28 -l melalui Diklatpim	Persentase Pejabat Struktural lulus Diklatpim (Persen)	100	100	100	100	100
22.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Persentase Perda yang disahkan (Persen)	100	100	100	100	100
23.	Reses (tatap muka dengan masyarakat)	Frekuensi Reses per tahun	3 x	3 x	3 x	3 x	3 x
24.	Peningkatan kapasitas petani/peternak dan pengusaha di bidang pertanian/peternakan	Jumlah pelaku utama dan usaha yang dilatih (orang)	-	285	285	285	285
25.	Pengembangan pertanian organik	Jumlah petani organik yang dilatih (orang)	-	500	500	500	500
26.	Peningkatan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan	Pola Pangan Harapan	90	91	91,5	93,1	93,1
27.	Pengembangan itik kalung sebagai ternak khas dari Kabupaten Magelang	Produksi bibit itik kalung	86.939	88.678	90.451	92.260	94.106
28.	Menjadikan Kabupaten Magelang sebagai Sentra Benih Ikan	Produksi benih ikan	1,1 jt	1,3 jt	1,5 jt	1,75 jt	2 jt
29.	Peningkatan sarana Prasarana Penunjang Perhubungan di wilayah Kabupaten Magelang	Cakupan sarana Prasarana Penunjang Perhubungan di wilayah Kabupaten Magelang	8,31	10,29	49,44	16,25	14,96
30.	Penanganan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
31.	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan sarana dan prasarana pelayanan KB Cakupan fasilitas pelayan program KB	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
32.	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Cakupan sarana dan prasarana pasar desa Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa	7% 20%	7% 20%	7% 20%	7% 20%	7% 20%
33.	Penyampaian Informasi pembangunan kepada masyarakat	Cakupan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
34.	Meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Magelang	Jumlah kunjungan wisata (- 28 -omestic)	4.410.074	4.876.660	5.892.611	5.968.149	6.594.051
35.	Pengiriman delegasi kesenian sebagai bagian dari promosi wisata	Frekuensi pengiriman delegasi	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x
36.	Penataan Struktur Industri di Kabupaten Magelang	Gedung KUMKM Center	-	-	1 unit	-	-
37.	Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Luas lahan tersertifikasi (Ha)	129	149	149	149	144
38.	Peningkatan jumlah pasar dengan kategori baik di Kabupaten Magelang	Persentase pasar kategori baik di Kabupaten Magelang (Persen)	56,25	62,50	68,75	75	81,25
39.	Penataan PKL khususnya di kawasan Muntilan, Mertoyudan, Secang, Grabag, dan Salaman	Persentase PKL yang tertata (Persen)	35	49	68	82	100
40.	Diraihnya Adipura Kota Muntilan	Adipura Kota Muntilan	-	-	-	-	Piala Adipura
41.	Program Menabung Air	Realisas Program Menabung Air	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
42.	Pengelolaan Limbah padat, cair, dan udara	Limbah padat, cair, dan udara terkelola dengan baik	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
43.	Peningkatan Keamanan, Ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal	Kondusifitas Kabupaten Magelang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
44.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	9	10	12	12	12
45.	Meningkatkan pemahaman politik di masyarakat	Kegiatan pembinaan politik daerah	6	8	10	12	12
46.	Peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	41.885	42.722	43.576	44.447	45.335
47.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Jumlah arsip yang dilestarikan	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48.	Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
49.	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan (persen)	60	70	80	100	100
50.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan statistic	Tersedianya dokumen perencanaan dan statistik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Tabel 3.19
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PRIORITAS PEMBENAHAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH									
I.1	Sumber Daya Manusia									
1	Meningkatnya pemahaman pengurus dan penyimpan barang terhadap aturan/regulasi terkait penatausahaan barang/aset.	Jumlah SKPD yang tervalidasi inventaris asetnya	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	DPPKAD	1.473.544.980
	Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									1.473.544.980
	1) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan manajemen aset/barang daerah		53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD		931.761.000
	2) Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah peserta pembinaan penatausahaan aset daerah		300	300	300	300	300		541.783.980
2	Meningkatnya pemahaman pejabat yang wajib mengisi dokumen LHKPN/LHKASN	Persentase dokumen LHKPN/LHKASN terisi dengan benar	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	100.000.000
	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH									100.000.000
	1) Fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Frekuensi fasilitasi LHKPN		1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	BKD	100.000.000
3.	Meningkatnya pemahaman terhadap kualitas pelaporan LAKIP/LKjIP	Persentase SKPD yang nilai LAKIP/LkjIPnya CC	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	5%	10%	15%	30%	35%	Setda	290.000.000
	Program: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									290.000.000
	1) Penyusunan LKjIP	Asistensi penyusunan LKjIP Kabupaten dan SKPD		53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD		290.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Meningkatnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS	Persentase PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	0,60%	1,00%	1,20%	1,50%	Setda	260.000.000
	Program: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									260.000.000
	1) Penerapan Budaya Kerja di Pemerintah Kabupaten Magelang	Jumlah peserta sosialisasi budaya kerja		-	60 org	100 org	120 org	150 org		260.000.000
5.	Meningkatnya penataan, kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang yang sesuai dengan hasil Anjab dan ABK	Persentase penataan, kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang yang sesuai dengan hasil Anjab dan ABK	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	1.699.740.870
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									1.699.740.870
	1) Penataan Pejabat Struktural dan Fungsional	Persentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi		100%	100%	100%	100%	100%		1.699.740.870
6.	Tersusunnya Peraturan Bupati Magelang tentang Kode Etik PNS Kabupaten Magelang	Peraturan Bupati Magelang tentang Kode Etik PNS Kabupaten Magelang		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BKD	15.000.000
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									15.000.000
	1) Penyusunan Perbup tentang Kode Etik PNS	Perbup Kode Etik PNS		1 Perbup	-	-	-	-		15.000.000
7.	Terwujudnya Penerapan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.	Laporan Implementasi Sistem Pola Karier		-	-	-	-	Ada	BKD	10.000.000
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									10.000.000
	1) Penyusunan Perbup tentang Pola Karir Pegawai	Perbup tentang Pola Karir Pegawai		-	-	-	-	Ada		10.000.000
8.	Meningkatnya peran Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tingkat Kabupaten Magelang dan Tingkat SKPD	Leveling Maturitas SPIP	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Inspektorat	75.000.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									75.000.000
	1) SPIP	Penerapan SPIP di Kabupaten		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		75.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Pengisian jabatan pada formasi jabatan yang masih kosong	Persentase pengisian jabatan pada formasi jabatan yang masih kosong	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%		1.699.740.870
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									1.699.740.870
	1) Penataan Pejabat Struktural dan Fungsional	Persentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi		100%	100%	100%	100%	100%		1.699.740.870
I.2	Mental Aparatur									
1.	Terwujudnya pemahaman para pengelola anggaran yang berorientasi pelaporan kinerja	Persentase pengelola anggaran yang telah didiklatkan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKAD	526.400.000
	Program: Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									526.400.000
	1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD berdasarkan SAP	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan		55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang		526.400.000
2.	Terwujudnya aparatur PNS yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	0,1%	0,2%	0,63%	1,00%	1,5%	Setda	260.000.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									260.000.000
	1) Sosialisasi dan Bimtek <i>Excellent Service</i>	Jumlah peserta		-	60 org	100 org	120 org	150 org		260.000.000
3.	Teraplikasikannya manajemen kinerja secara sempurna oleh Pemerintah Kabupaten	Monitoring Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Setda	50.000.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									50.000.000
	1) Aplikasi e-SAKIP	Aplikasi e-SAKIP dibangun		-	-	Ada	Ada	Ada		50.000.000
4.	Terwujudnya pemberian penghargaan/insentif berdasarkan kinerja	Pemberian penghargaan/insentif berdasarkan kinerja	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi						Setda	10.000.000
	Program: Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									10.000.000
	1) TPP berdasarkan kinerja	Perbup TPP berdasarkan kinerja		-	-	Ada	Ada	Ada		10.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.3	Pengawasan									
1.	Meningkatnya penguatan peran APIP	Jumlah pembentukan dan peningkatan jenjang auditor	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	29 org	32 org	34 org	36 org	41 org	Inspektorat	267.500.000
	Program : Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan									267.500.000
	1) Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang bersertifikat		5 orang	3 orang	2 orang	4 orang	5 orang		165.000.000
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		46 orang	46 orang	48 orang	48 orang	50 orang		102.500.000
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa	Persentase aparat pengawasan yang bersertifikat	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	165.000.000
	Program : Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan									165.000.000
	1) Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang bersertifikat		5 orang	3 orang	2 orang	4 orang	5 orang		165.000.000
3.	Terwujudnya <i>mindset early warning</i> di bidang pengawasan	Cakupan pengawasan dan pengendalian kebijakan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	1.883.000.000
	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									1.883.000.000
	1) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah kasus yang ditangani		8 kasus	9 kasus	9 kasus	9 kasus	9 kasus		86.000.000
	2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah unit kerja yang dimonitoring		30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit		57.000.000
	3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani		300 obrik	300 obrik	300 obrik	300 obrik	300 obrik		1.740.000.000
4.	Diraihnya opini WTP dari BPK	Opini WTP dari BPK	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP		165.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									165.000.000
	1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD)	Jumlah laporan keuangan yang direviu sesuai SAP		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		165.000.000
II	PRIORITAS PEMELIHARAAN TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH BAIK									
II.1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel									
1.	Penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Dokumen Pakta Integritas seluruh Pejabat Struktural	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	1.699.740.870
	Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									1.699.740.870
	1) Penataan Pejabat Struktural dan Fungsional	Persentase jabatan struktural dan fungsional yang diisi		100%	100%	100%	100%	100%		1.699.740.870
2.	Penyampaian LHKPN/LHKASN oleh seluruh Pejabat Eselon II di Kabupaten Magelang	Laporan LHKPN dari seluruh Pejabat Eselon II	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	100.000.000
	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH									100.000.000
	1) Fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Frekuensi fasilitasi LHKPN		1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	BKD	100.000.000
3.	Terwujudnya mekanisme pengadaan barang dan jasa yang transparan melalui <i>e-Procurement</i>	<i>e-Procurement</i> terselenggara dengan baik	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Setda	9.757.046.790
	Program: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									9.757.046.790
	1) Fasilitasi Pelaksanaan LPSE	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik		100%	100%	100%	100%	100%		876.231.790
	2) Fasilitas Pelaksanaan ULP	Jumlah paket pengadaan yang terlaksana		300 paket	300 paket	300 paket	300 paket	300 paket		8.880.815.000
4.	Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Magelang yang bersih dari korupsi	RAD-PPK Hijau	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	BAPPEDA	360.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									360.000.000
	1) Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD-PPK	Laporan RAD-PPK		8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8Lap		360.000.000
5.	Terlaksananya inventarisasi dan Re-evaluasi Aset Daerah	Data inventaris asset sesuai dengan neraca	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPKAD	3.068.134.420
	Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									3.068.134.420
	1) Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	Jumlah laporan akhir hasil sensus barang		6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok		1.406.757.720
	2) Pengolahan Data Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data BMD		4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok		1.301.972.700
	3) Penyusunan Perda dan atau Perbup tentang BMD	Perda/Perbup BMD		-	1 Perda/Perbup	1 Perda/Perbup	1 Perda/Perbup	1 Perda/Perbup		359.404.000
II.2	Birokrasi yang Efektif dan Efisien									
1.	Terwujudnya struktur organisasi yang <i>right sizing</i>	Perda dan Perbup tentang SOTK	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	5 Perda/Perbup	-	-	-	Setda	400.000.000
	Program: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									400.000.000
	1) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD terevaluasi		53 SKPD	53 SKPD	-	-	-		400.000.000
2.	Terwujudnya mekanisme perencanaan penganggaran yang efektif, efisien dan ekonomis melalui penerapan Analisis Standar Biaya (ASB)	Penerapan sistem perencanaan penganggaran berbasis ASB	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	DPPKAD	392.635.000
	Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									392.635.000
	1) Penyusunan ASB dan Revisi ASB	Jumlah SKPD yang menerapkan ASB		-	53 SKPD	53 SKPD	-	-		392.635.000
3.	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian yang cepat, akurat, transparan, dan kredibel	Aplikasi SIMPEG	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	190.000.000
	Program: Peningkatan Manajemen Kepegawaian									190.000.000
	1) Aplikasi SIMPEG	Aplikasi SIMPEG		-	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh		190.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Terwujudnya pengembangan sistem informasi manajemen	Persentase SKPD yang telah menerapkan <i>e-Government</i>	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	70%	75%	80%	85%	90%	Diskominfo	3.031.662.000
	Program: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa									3.031.662.000
	1) Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pos dan Telekomunikasi	Sistem informasi Postel		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		175.000.000
	2) Langganan Koneksi Jaringan Internet	Jumlah layanan <i>bandwidth</i> koneksi se Kab. Magelang		15 Mbps	30 Mbps	45 Mbps	50 Mbps	50 Mbps		2.519.116.000
	3) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Surat Menyurat Kab. Magelang	Aplikasi Surat Menyurat Kab. Magelang		-	1 Apliasi	-	-	-		337.546.000
5.	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Setda	220.000.000
	Program: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									220.000.000
	1) Penerapan Budaya Kerja di Pemerintah Kabupaten Magelang	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB		-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		220.000.000
II.3	Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas									
1.	Tercapainya rata-rata nilai IKM baik diseluruh Unit Pelayanan Publik dan SKPD	Persentase rata-rata peningkatan nilai IKM	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Setda	253.000.000
	Program: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									253.000.000
	1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah UPP yang dievaluasi		86 UPP	162 UPP	162 UPP	162 UPP	162 UPP		253.000.000
2.	Terwujudnya tata kelola perijinan satu atap dan satu pintu	Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Perijinan ke BPPMPT	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	Setda	70.000.000
	Program: Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									70.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Penyusunan Regulasi di bidang Penanaman Modal	Draft Perbup yang disusun		1 Draft Perbup	1 Draft Perbup	1 Draft Perbup	1 Draft Perbup	1 Draft Perbup		70.000.000
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jamkesmas	Jamkesda bagi warga masyarakat miskin yang tidak memiliki Jamkesmas	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	BAPPEDA	495.000.000
	Program: Program Perencanaan Sosial dan Budaya									495.000.000
	1) Pemutakhiran data JAMKESDA	Jumlah peserta Jamkesda		166.816	166.816	166.816	166.816	166.816		495.000.000
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan di seluruh kecamatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN di kecamatan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Setda	130.000.000
	Program: Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH									130.000.000
	1) Peningkatan Pelayanan PATEN	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN		21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec		130.000.000
III	Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
III.1	Pelayanan Sektor Strategis									
III.1.1	Sektor Kesehatan									
1.	Meningkatnya status RSUD Muntilan menjadi RSUD Tipe B	Status RSUD Muntilan tipe B	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	1 RS Tipe B	Dinkes	192.000.000.000
	Program: Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata									192.000.000.000
	1) Pengadaan Tanah Rumah Sakit	Jumlah lokasi pengadaan tanah		-	1 lokasi	-	-	-		17.150.000.000
	2) Penyusunan Studi Kelayakan RSUD	Jumlah dokumen studi kelayakan		1 dok	1 dok	-	-	-		700.000.000
	3) Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Tipe B	Jumlah Rumah Sakit Tipe B yang dibangun		-	-	-	-	1 RS Tipe B		174.150.000.000
2.	Meningkatnya status Puskesmas menjadi PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	PPK BLUD	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	29	29	29	29	29	Dinkes	359.556.597.000
	Program : Manajemen Pelayanan Kesehatan									359.556.597.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan pelayanan BLUD		29	29	29	29	29		359.318.157.000
	2) Pengembangan BLUD Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD		29	29	29	29	29		238.440.000
3.	Bertambahnya Puskesmas Rawat Inap dari 3 Puskesmas menjadi 9 Puskesmas	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang baru	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	3	3	5	7	9	Dinkes	6.000.000
	Program : : Manajemen Pelayanan Kesehatan									6.000.000
	1) Pengembangan Puskesmas Rawat Inap	Jumlah pengembangan Puskesmas Rawat Inap		-	1	1	2	2		6.000.000
4.	Tersebar nya informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat	Informasi kesehatan pada masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinkes	210.000.000
	Program: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat									210.000.000
	1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah media cetak		7 media	6 media	6 media	6 media	6 media		60.000.000
	2) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Frekuensi penyuluhan melalui media elektronik		618 kali	618 kali	618 kali	618 kali	618 kali		150.000.000
5.	Tersusun nya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang kesehatan	SOP bidang kesehatan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinkes	503.837.000
	Program: Upaya Kesehatan Masyarakat									503.837.000
	1) Penanganan KLB	Jumlah Puskesmas melaksanakan Protap penanggulangan bencana		29	29	29	29	29		279.287.000
	2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana	Jumlah Puskesmas melaksanakan Protap penanggulangan bencana		29	29	29	29	29		224.550.000
6.	Meningkat nya kapasitas tenaga kesehatan di Kabupaten Magelang	Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti Bimtek sesuai dengan kompetensinya	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes	487.530.000
	Program: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									130.030.000
	1) Pelatihan Mutu Pelayanan Tenaga Kesehatan	Jumlah pegawai dilatih customer services		58 org	58 org	58 org	58 org	58 org		130.030.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat									357.500.000
	2) Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Jumlah dokter gigi dan perawat gigi dilatih		29 org	29 org	29 org	29 org	29 org		100.000.000
	3) Peningkatan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan	Jumlah perawat dan bidan dilatih		29 org	29 org	29 org	29 org	29 org		136.000.000
	4) Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Gulkin)	Jumlah tenaga kesehatan dibina penanggulangan jiwa		20 org	29 org	29 org	29 org	29 org		121.500.000
7.	Optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan Standar Pelayanan (SP), SOP, Maklumat/Janji Layanan, dan survey kepuasan di bidang kesehatan	Cakupan kegiatan yang melibatkan masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%		264.000.000
	Program : Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat									264.000.000
	1) Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah pengembangan PHBS rumah tangga dan sekolah		184 lokasi	184 lokasi	184 lokasi	184 lokasi	184 lokasi		50.000.000
	2) Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah pengembangan UKBM aktif		87 UKBM	87 UKBM	87 UKBM	87 UKBM	87 UKBM		214.000.000
8.	Optimalnya sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	100%	100%	100%		-
	Program: -									-
	-			-	-	-	-	-		-
9.	Optimalnya integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS	Jamkesda yang terintegrasi dalam BPJS	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	Tahap I	Tahap II		60.509.019.000
	Program: Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin									60.509.019.000
	1) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin)	Jumlah masyarakat penerima layanan Jamkesda/BPJS*		178.894	178.894	178.894	178.894	178.894		60.509.019.000
10.	Optimalnya penerapan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	Persentase Puskesmas yang menerapkan SIMPUS	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%		506.500.000
	Program: Standarisasi Pelayanan Kesehatan									506.500.000
	1) Pengembangan Simpus Rawat Jalan	Jumlah pengembangan Simpus		1 Simpus	1 Simpus	1 Simpus	1 Simpus	1 Simpus		96.500.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Pengadaan Komputer Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Simpus Multi User	Jumlah Puskesmas melaksanakan simpus multi user		-	29 Pusk	-	-	29 Pusk		410.000.000
III.1.2	Sektor Pendidikan									
1.	Terwujudnya pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program wajib belajar Sembilan Tahun dengan bantuan operasional daerah (BOSDA), biaya penyelenggaraan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK	Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	3.375 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa		
	Program: Wajib Belajar Sembilan Tahun									1.022.500.000
	1) Beasiswa Anak Kurang Mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin)(Pendamping)	Jumlah siswa penerima Beasiswa Anak Kurang Mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin)		900 siswa	900 siswa	900 siswa	900 siswa	900 siswa		37.500.000
	2) Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP		175 siswa	180 siswa	180 siswa	180 siswa	180 siswa		985.000.000
	Program : Pendidikan Menengah									
	3) Beasiswa Kurang Mampu bagi Siswa SMA/MA dan SMK(GULKIN)(Pendamping)	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Kurang Mampu bagi Siswa SMA/MA dan SMK(GULKIN)		640 siswa	1280 siswa	1280 siswa	1280 siswa	1280 siswa		25.000.000
	4) Beasiswa Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Siswa Berprestasi		160 siswa	200 siswa	200 siswa	200 siswa	200 siswa		985.000.000
	Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan									14.500.000.000
	5) BOSDA (sekolah Negeri)	Jumlah orang yang memperoleh BOSDA (sekolah Negeri)		1500 org	1500 org	1500 org	1500 org	1500 org		14.500.000.000
	Program : Pendidikan Tinggi									3.600.000.000
	6) Fasilitasi Beasiswa ke PT yang Terakreditasi A untuk penduduk miskin	Jumlah siswa penerima beasiswa		-	32 siswa	32 siswa	32 siswa	40 siswa		3.600.000.000
2.	Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD, SMP (2.035 ruang) melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, swasta (DAK 2014), peningkatan mutu sarpras pendidikan SD/SMP Negeri/Swasta	Persentase ruang kelas kategori baik (memenuhi SNI)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	85,72	87,14	88,57	90,00	91,43		20.579.958.310

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah									20.579.958.310
	1) Kegiatan Konstruksi Bangunan Sekolah			-	2035	-	-	-		20.579.958.310
3.	Terlaksananya rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui pemberian beasiswa siswa SD/SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Kejar paket A, B, dan C	APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	102,34 95,56 69,70 95,49 78,90 55,56	102,14 96,06 71,10 95,89 79,95 58,06	101,04 95,56 73,40 96,09 80,85 51,56	101,94 97,06 75,10 96,79 81,96 64,06	101,84 97,56 80,00 97,09 82,65 66,56		16.532.500.000
	Program: Wajib Belajar Sembilan Tahun									1.022.500.000
	1) Beasiswa Anak Kurang Mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin)(Pendamping)	Jumlah siswa penerima Beasiswa Anak Kurang Mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin)		900 siswa	900 siswa	900 siswa	900 siswa	900 siswa		37.500.000
	2) Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP		175 siswa	180 siswa	180 siswa	180 siswa	180 siswa		985.000.000
	Program : Pendidikan Menengah									1.010.000.000
	3) Beasiswa Kurang Mampu bagi Siswa SMA/MA dan SMK(GULKIN)(Pendamping)	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Kurang Mampu bagi Siswa SMA/MA dan SMK(GULKIN)		640 siswa	1280 siswa	1280 siswa	1280 siswa	1280 siswa		25.000.000
	4) Beasiswa Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Siswa Berprestasi		160 siswa	200 siswa	200 siswa	200 siswa	200 siswa		985.000.000
	Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan									14.500.000.000
	5) BOSDA (sekolah Negeri)	Jumlah orang yang memperoleh BOSDA (sekolah Negeri)		1500 org	1500 org	1500 org	1500 org	1500 org		14.500.000.000
4.	Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD/SMP maupun SMA/SMK	Jumlah Sekolah Unggul berbagai tingkatan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	21SD, 8 SMP, 2 SMA, 2 SMK	-	-	-	Disdikpora	37.200.000.000
	Program : Wajib Belajar Sembilan Tahun									37.200.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD dan SMP	Jumlah sekolah unggulan yang mendapat bantuan		-	21SD, 8 SMP, 2 SMA, 2 SMK	-	-	-		37.200.000.000
5.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui Bimtek Peningkatan Guru Kelas, Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (Persen)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	83	84	85	86	88	Disdikpora	5.520.000.000
	Program : Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan									
	1) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bangub)	Jumlah penerima bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik Formal		100 orang	90 orang	85 orang	85 orang	80 orang		1.750.000.000
	2) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bangub)	Jumlah penerima bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD		64 orang	60 orang	60 orang	60 orang	55 orang		1.120.000.000
	3) Bimtek peningkatan kompetensi Guru Kelas	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel		360 orang	340 orang	310 orang	310 orang	310 orang		1.325.000.000
	4) Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kompetensi Guru Mapel		360 orang	340 orang	310 orang	310 orang	310 orang		1.325.000.000
6.	Meningkatnya layanan PAUD dengan pemberian bantuan pembangunan Unit Gedung baru	APK PAUD	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	53,93	54,08	54,23	54,39	54,54		1.500.000.000
	Program : Pendidikan anak usia dini									
	1) Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bangub)	Jumlah Terbangunnya Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga		1.500.000.000
7.	Meningkatnya layanan mutu pembinaan pemuda dan olah raga	Cakupan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%		7.726.600.000
	Program : Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda									200.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Pelatihan Manajemen Osis SMP, SMA/SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti Pelatihan Manajemen Osis SMP, SMA/SMK		120 siswa	120 siswa	120 siswa	120 siswa	120 siswa		100.000.000
	2) Rakor Kepemudaan	Jumlah orang yang mengikuti Rakor Kepemudaan		105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang		100.000.000
	Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan									202.000.000
	3) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan fasilitasi KUPP	Jumlah pemuda yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda		105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang		202.000.000
	Program : Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga									3.500.000.000
	4) Pembinaan dan Penghargaan Olahraga Prestasi Siswa	Jumlah cabor yang memperoleh Pembinaan dan Penghargaan Olahraga Prestasi Siswa		17 Cabor	17 Cabor	17 Cabor	17 Cabor	17 Cabor		3.500.000.000
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga									3.824.600.000
	5) Sarana Fasilitas Klub Olahraga Pelajar	Jumlah klub dalam kegiatan Sarana Fasilitas Klub Olahraga Pelajar		10 Klub OR Pelajar	10 Klub OR Pelajar	10 Klub OR Pelajar	10 Klub OR Pelajar	10 Klub OR Pelajar		1.075.000.000
	6) Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah cabor untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga		21 Cabor	21 Cabor	21 Cabor	21 Cabor	21 Cabor		1.199.600.000
	7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Jumlah OKP yang dibantu Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga		14 OKP	14 OKP	14 OKP	14 OKP	14 OKP		500.000.000
	8) Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah cabor dalam kegiatan Fasilitas Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan dan Olahraga		21 Cabor	21 Cabor	21 Cabor	21 Cabor	21 Cabor		500.000.000
	9) Peningkatan Mutu Manajemen OR Masyarakat dan Olahraga	Jumlah organisasi untuk kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan dan Olahraga		21 organisasi Karang Taruna	21 organisasi Karang Taruna	21 organisasi Karang Taruna	21 organisasi Karang Taruna	21 organisasi Karang Taruna		550.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Tersusunnya SOP Pelayanan Bidang Pendidikan		Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		-
	Program :									
	-									
9.	Optimalnya sistem dan mekanisme pengaduan di bidang pendidikan	Persentase penanganan pengaduan di bidang pendidikan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%		-
III.1.3	Sektor Infrastruktur									
1.	Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan (kabupaten dan desa)	- Persentase jalan dalam kondisi baik (Persen)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	68,53	69,01	69,25	69,49	69,73	DPU ESDM	236.548.597.670
	Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan									236.548.597.670
	1) Peningkatan Jalan Kabupaten I	Panjang jalan yang ditingkatkan		13 km	28,15 km	29,3 km	29,15 km	27 km		63.057.477.170
	2) Peningkatan Jalan Kabupaten II	Panjang jalan yang ditingkatkan		13 km	13 km	14 km	20 km	18 km		72.970.000.000
	3) Peningkatan Jalan Kabupaten III	Panjang jalan yang ditingkatkan		19 Paket	-	-	-	-		12.640.525.000
	4) Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan		-	7 paket	2 paket	4 paket	4 paket		23.600.000.000
	5) Peningkatan Jalan Kabupaten (BANGUB)	Panjang jalan yang ditingkatkan		2,5 km	2,5 km	2,5 km	2,2 km	2,2 km		11.250.000.000
	6) Peningkatan Jembatan Kabupaten I	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan		8	7	8	6	5		63.621.995.500
	7) Peningkatan Jembatan Kabupaten II	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan		3	-	-	-	-		1.620.000.000
	8) Peningkatan Jembatan Kabupaten (BANGUB)	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan		14 paket	-	-	-	-		1.615.000.000
	9) Peningkatan Jembatan Rejosari	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan		-	-	1	-	-		30.000.000.000
	10) Peningkatan Jembatan Desa	Jumlah jembatan desa yang ditingkatkan		-	3	3	3	3		9.720.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Optimalnya pengelolaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air irigasi	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Persen)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	58,16	60,02	62,72	64,62	67,42	DPU ESDM	89.411.817.180
	Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya									89.411.817.180
	1) Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi	Jumlah bendungan yang dibangun		10 Bh	10 Bh	10 Bh	10 Bh	10 Bh		14.088.000.000
	2) Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah wilayah sungai beserta lingkungannya yang dipelihara dan dinormalisasi		1	2	2	2	2		3.756.407.240
	3) Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi DAK, SILPA DAK	Luas cakupan layanan jaringan irigasi		19 DI	20 DI	20 DI	20 DI	20 DI		34.991.384.000
	4) Penanggulangan, Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Akibat Bencana Alam	Luas cakupan layanan jaringan irigasi		2	3	3	3	3		34.435.025.940
	5) Pembuatan Bangunan Ukur Debit Air	Jumlah bangunan ukur debit air yang dibangun		10 DI	15 DI	15 DI	15 DI	15 DI		2.141.000.000
3.	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan	Persentase permukiman kumuh	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	2,79	2,75	2,55	2,50	2,45	DPU ESDM	11.156.000.000
	Program: Pembangunan Infrastruktur Perdesaan									8.000.000.000
	1) Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kabupaten Magelang		-	2,75	2,55	2,50	2,45		8.000.000.000
	Program : Lingkungan Sehat Perumahan									3.156.000.000
	2) Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi yang ditata		-	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		2.450.000.000
	3) Training Badan Pengelola SLBM dan Sanimas	Jumlah personel Badan Pengelola SLBM dan Sanimas		200 org	200 org	225 org	225 org	230 org		706.000.000
4.	Optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Magelang	Persentase sampah yang tertangani	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	23%	25%	27%	29%	31%	DPU ESDM	20.090.561.000
	Program: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									20.090.561.000
	1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Lokasi Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan		7 Kec	7 Kec	7 Kec	7 Kec	7 Kec		5.880.623.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Muntilan	Lokasi Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan di Kota Muntilan		1 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec		3.118.250.000
	3) Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		-	-	1 Dok	-	-		450.000.000
	4) Penyusunan Studi Kelayakan TPST 3R	Jumlah dokumen Studi Kelayakan yang tersusun		-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok		600.000.000
	5) Pendidikan dan penyuluhan sampah 3R	Jumlah peserta		-	100 org	100 org	100 org	100 org		700.000.000
	6) Pengadaan tanah untuk Perluasan TPA Pasuruan	Tanah Untuk Perluasan TPA Pasuruan		-	1 paket	-	-	-		2.000.000.000
	7) DED pembangunan TPST	Dokumen DED		-	-	1 Dok	-	-		195.000.000
	8) Rehab TPSS	Jumlah TPSS yang direhab		2 TPSS	4 TPSS	4 TPSS	4 TPSS	4 TPSS		1.000.000.000
	9) Pengadaan Lahan TPST, FS lahan dan pengadaannya	Jumlah paket		-	1 Paket	-	1 Paket	-		1.161.250.000
	10) Pembangunan TPST	Jumlah unit bangunan		-	-	1 Unit	-	1 Unit		1.335.438.000
	11) Pengelolaan Sampah di TPA	Lokasi pengelolaan sampah		-	1 TPA	1 TPA	-	-		650.000.000
	12) Pengadaan Lahan TPA Regional	Tersedianya Lahan untuk TPA regional		-	Lahan	-	-	-		2.000.000.000
	13) Penyusunan DED TPA Regional	Jumlah DED TPA Regional yang tersusun		-	-	1 DED	-	-		1.000.000.000
III.1.4	Sektor Trantibumlinmas									
1.	Terwujudnya penegakan hukum di daerah	Frekuensi penegakan hukum di daerah	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	0%	0%	0%	0%	0%	Satpol PP	3.552.336.000
	Program: Penataan Peraturan Perundang-Undangan									3.552.336.000
	1) Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Penegakan Perda		132 x	132 x	132 x	132 x	132 x		1.350.000.000
	2) Operasi Penertiban Penambang Liar	Frekuensi operasi penambang liar		96 x	96 x	96 x	96 x	96 x		984.844.000
	3) Penanganan Perkara (Non Litigasi)	Persentase penanganan perkara		-	100%	100%	100%	100%		1.217.492.000
2.	Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Angka kriminalitas	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	2,51	2,32	2,13	1,82	1,62	Satpol PP	713.496.860
	Program: Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									713.496.860
	1) Operasi Represif Non Yustisi	Frekuensi Operasi Represif Non Yustisi		21 x	21 x	21 x	21 x	21 x		90.650.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Operasi Penertiban Pasar, PKL, Perparkiran, Tempat Umum dan Tempat Wisata	Frekuensi OPP		24 x	24 x	24 x	24 x	24 x		225.696.860
	3) Pembinaan Trantib dan Patroli Wilayah	Frekuensi pembinaan trantib dan patroli wilayah		50 x	50 x	50 x	50 x	50 x		227.850.000
	4) Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Frekuensi Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa		12 x	12 x	12x	12 x	12 x		90.150.000
	5) Operasi/Pembinaan Penyakit Masyarakat	Frekuensi operasi/pembinaan penyakit masyarakat		21 x	21 x	21 x	21 x	21 x		79.150.000
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan	- Rasio Linmas - Jumlah Kader Siaga Trantib	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	95,54 216	96,77 216	98,41 405	99,64 540	100,87 605	Satpol PP	409.000.000
	Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									109.000.000
	1) Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Frekuensi pembinaan per kecamatan		3 x / 21 kec	3 x / 21 kec	3 x / 21 kec	3 x / 21 kec	3 x / 21 kec		109.000.000
	Program : Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									300.000.000
	2) Pembinaan dan Pengembangan Kader Siaga Trantib (KST)	Jumlah desa untuk KST		-	-	45 Desa	60 Desa	75 Desa		300.000.000
4.	Meningkatnya kapasitas aparat Satpol PP yang kompeten dan profesional	Frekuensi Pelatihan Satpol PP	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	6 x	9 x	9 x	9 x	9 x	Satpol PP	494.000.000
	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									494.000.000
	1) Fasilitasi kegiatan pelatihan Satpol PP	Jumlah aparat yang dilatih		34 org	34 org	34 org	34 org	34 org		494.000.000
5.	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di Satpol PP	Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	84.680.000
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									84.680.000
	1) Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dibeli		1 perang kat	1 perang kat	-	1 perang kat	-		84.680.000
6.	Tersusunnya revisi Perda tentang PPNS	Revisi Perda tentang PPNS	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		25.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan									25.000.000
	1) Revisi Perda PPNS	Revisi Perda PPNS		1 Revisi Perda	-	-	-	-		25.000.000
III.1.5	Sektor Sosial									
1.	Berkurangnya jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	15,4	16,4	17,4	18,5	20,0	Disnakersostrans	5.990.066.544
	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya									5.990.066.544
	1) Pemberdayaan Keluarga Veteran melalui Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah keluarga veteran yang terbedayakan		32	25	25	25	25		450.000.000
	2) Fasilitasi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi		30	50	50	50	50		80.000.000
	3) Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial (PSKS)pemberdayaan fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Jumlah petugas dan pendamping pemberdayaan PMKS yang ter Bimtek		50	50	50	50	50		283.736.544
	4) Fasilitasi Program PKH	Jumlah Keluarga Harapan yang terfasilitasi		13.323	11.671	11.671	11.671	11.671		750.000.000
	5) Bimbingan Mental Sosial Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi PMKS	Jumlah PMKS keluarga rentan yang terbimbing dan menerima bantuan modal usaha		136	130	130	130	130		1.463.165.000
	6) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakali	Jumlah anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar yang terlatih		55	301	301	301	301		500.000.000
	7) Bimbingan Mental Sosial dan latihan Keterampilan serta Bantuan Modal Usaha Lanjut Usia Terlantar	Jumlah PMKS keluarga rentan yang terbimbing dan menerima bantuan modal usaha		136	130	130	130	130		1.463.165.000
	8) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Bekerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, anak cacat dan anak nakal	Jumlah anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar yang terlatih		55	301	301	301	301		500.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9) Bimbingan Mental Sosial dan Latihan Keterampilan serta Bantuan Modal Usaha Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lansia terlantar yang terbimbing mentalnya dan diterimanya bantuan sosial		55	210	210	210	210		500.000.000
2.	Meningkatnya kualitas PSKS	Persentase PSKS yang layak	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakersostras	7.047.100.000
	Program: Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo									7.047.100.000
	1) Pembinaan Panti Sosial	Jumlah panti asuhan yang terbina		-	5	5	5	5		250.000.000
	Program : Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Studi Kelayakan Panti dan TMP								
	2) Studi Kelayakan Panti Asuhan dan Taman Makam Pahlawan Pemerintah Kabupaten Magelang	Jumlah studi kelayakan panti dan TMP		-	2	-	-	-		50.000.000
	3) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Panti Sosial dan TMP	Luas Tanah yang dibeli		-	-	5 Ha	-	-		5.000.000.000
	4) Pembangunan Panti Sosial Pemerintah	Panti Asuhan yang dibangun		-	-	-	1	-		947.100.000
	5) Pengadaan Sarpras Panti Asuhan Pemerintah	Sarpras yang dibeli		-	-	-	-	1 paket		800.000.000
III.1.6	Sektor Administrasi Kependudukan dan Perijinan									
1.	Optimalnya kelembagaan lembaga yang menangani perizinan	Laporan Evaluasi dan Kajian SOTK BPPPT (Regulasi pelimpahan wewenang perizinan)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPPPT	90.000.000
	Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Inventasi									90.000.000
	1) Penyusunan Regulasi di bidang Penanaman Modal	Jumlah draft Perbup yang disusun		1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft		90.000.000
2.	Tersusunnya SP dan SOP pelayanan bidang perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil	SP dan SOP pelayanan bidang perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPPPT	1.510.000.000
	Program: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Inventasi									1.370.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah surat perizinan yang diterbitkan		3000 ijin	3000 ijin	3000 ijin	3000 ijin	3000 ijin		1.370.000.000
	Program : Penataan Administrasi Kependudukan								Disdukcapil	140.000.000
	2) Pembangunan Data Center SIAK dan e-KTP	Gedung Data Center		1	-	-	-	-		80.000.000
	3) Penataan dan Penyempurnaan Kelengkapan Gedung Data Center	Jumlah gedung yang tertata		-	1	-	-	-		60.000.000
3.	Terwujudnya pelayanan penyusunan adminduk, capil dan perizinan keliling	Pengadaan mobil operasional adminduk	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Mobil	-	-	-	-	Disdukcapil	500.000.000
	Program: Penataan Administrasi Kependudukan									500.000.000
	1) Pengadaan Mobil Operasional Administrasi Kependudukan	Pengadaan mobil		1 Mobil	-	-	-	-		500.000.000
	2) Pelayanan adminduk keliling	Operasional pelayanan adminduk keliling		-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		-
4.	Meningkatnya Standar Pelayanan Mutu di bidang perizinan	SIM-PAP PM dan SPIPISE	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	BPMPPT	422.500.000
	Program: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									422.500.000
	1) Penyusunan SIM-PAP PM	Aplikasi SIM-PAP PM		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		372.500.000
	2) Implementasi SPIPISE di Kabupaten Magelang	Aplikasi SPIPISE		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		50.000.000
5.	Optimalnya sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	BPMPPT	310.000.000
	Program: Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									310.000.000
	1) Pengawasan Dokumen Perizinan yang habis masa berlaku	Jumlah pemilik usaha yang dokumen perizinannya telah habis masa berlakunya		70 pengusaha	70 pengusaha	70 pengusaha	70 pengusaha	70 pengusaha		90.000.000
	2) Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditangani		15 aduan	15 aduan	15 aduan	15 aduan	15 aduan		220.000.000
6.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Kenaikan realisasi PMDN (Milyar)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	180	116	254	164	359	BPMPPT	96.500.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									96.500.000
	1) Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi (CJIBF)	Frekuensi fasilitasi dan koordinasi		1 x	1 x	1 x	1 x	1 x		96.500.000
7.	Terwujudnya perumusan dan penguatan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal	Perda tentang Penanaman Modal	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	BPMPPT	90.000.000
	Program: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									90.000.000
	1) Penyusunan Regulasi di bidang Penanaman Modal	Jumlah draft Perbup yang disusun		1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft		90.000.000
8.	Meningkatnya plafon anggaran untuk kegiatan promosi peluang investasi	Frekuensi kegiatan promosi peluang investasi	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	4 x	4 x	4 x	4 x	4x	BPMPPT	1.051.000.000
	Program: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									1.051.000.000
	1) Penyelenggaraan Pameran Investasi BANEX dan SOLORAYA 2015	Frekuensi Pameran Investasi BANEX dan SOLORAYA 2015		2 x	2 x	2 x	2 x	2 x		-
	2) Penyusunan buku Magelang Investment and Trading Opportunity	Buku Magelang Investment and Trading Opportunity		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		-
	3) Penyelenggaraan Pameran Investasi	Frekuensi penyelenggaraan pameran investasi		2 x	2 x	2 x	2 x	2 x		916.500.000
	4) Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan	Jumlah buku kajian yang disusun		3 buku	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku		84.500.000
	5) Penyusunan Profil /Direktori PMA / PMDN di Kabupaten Magelang	Buku profil yang disusun		1 buku profil	1 buku profil	1 buku profil	1 buku profil	1 buku profil		50.000.000
9.	Meningkatnya partisipasi aktif BPMPPT dalam forum kerja sama dengan dunia usaha	- Jumlah fasilitasi dan kerjasama kemitraan usaha - Rating Pemda Pro Investasi	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	BPMPPT	90.000.000
	Pogram: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									90.000.000
	1) Fasilitasi dan kerjasama kemitraan usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org		50.000.000
	2) Penilaian Rating Pemda Pro Investasi	Frekuensi penilaian rating		-	1 x	-	1 x	-		40.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.2	Quick Wins									
1.	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang	Dokumen SP pada seluruh SKPD di Kabupaten Magelang	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	-	-	-	-	Setda	90.000.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									90.000.000
	1) Fasilitasi Penyusunan SOP, SPP dan SPM SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki SP		53 SKPD	-	-	-	-		90.000.000
2.	Aplikasi PATEN di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.	21 kecamatan menerapkan PATEN	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	-	-	-	-	Setda	50.000.000
	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH									50.000.000
	1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN		21 Kecamatan	-	-	-	-		50.000.000
3.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural	Dokumen Evaluasi Jabatan Struktural	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Dok	-	-	-	-	Setda	77.800.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									77.800.000
	1) Evaluasi Jabatan	Jumlah Jabatan terevaluasi.		515 Jabatan	-	-	-	-		77.800.000
4.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Dok	-	-	-	-		97.000.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									97.000.000
	1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah SKM/SKT tersusun.		SKM JFU 30 SKPD	-	-	-	-		97.000.000
5.	Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).	Perbup tentang TNDE	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Perbup TNDE	-	-	-	-		39.400.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									39.400.000
	1) Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas	Perbup tentang TNDE		Perbup TNDE	-	-	-	-		39.400.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Pelaksanaan Monev <i>online</i> , untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan dan fisik APBD.	Aplikasi SIMONEVA	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Aplikasi	-	-	-	-		188.400.000
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									188.400.000
	1) Pengadaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Aplikasi SIMONEVA		1 Aplikasi	-	-	-	-		188.400.000
7.	Sistem Informasi Kepegawaian (SIPGAN) <i>online</i> .	Aplikasi SIPGAN <i>online</i>	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	BKD	45.000.000
	Program : Peningkatan Manajemen Kepegawaian									45.000.000
	1) Validasi Database Kepegawaian	Aplikasi SIPGAN <i>online</i>		1 Aplikasi	-	-	-	-		45.000.000
8.	Pengembangan RSUD Tipe B	RSUD Tipe B	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	1 RS Tipe B	Dinkes	174.150.000.000
	Program: Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata									174.150.000.000
	1) Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Tipe B	Jumlah Rumah Sakit Tipe B yang dibangun		-	-	-	-	1 RS Tipe B		174.150.000.000
9.	Pengembangan Puskesmas menjadi RSUD Tipe D	RSUD Tipe D	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	RSUD Tipe D	Dinkes	1.963.160.000
	Program : Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata									350.000.000
	1) Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Menjadi RS Tipe D	Dokumen Studi Kelayakan		-	1 Dok	-	-	-		350.000.000
	Program : Manajemen Pelayanan Kesehatan									1.613.160.000
	2) Peningkatan Status Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Tipe D	Jumlah Puskesmas rawat inap persiapan menjadi Rumahsakit tipe D		-	-	-	-	2 Puskesmas		238.160.000
	3) Pengembangan Rumah Sakit Tipe D	Jumlah pengembangan rumah sakit tipe D		-	-	-	-	2 Puskesmas		1.375.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD/SMP maupun SMA/SMK	Jumlah Sekolah Unggul berbagai tingkatan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	21 SD, 6 SMP, 2SMA, 2 SMK	-	-		Disdikpora	37.200.000.000
	Program : Wajib Belajar Sembilan Tahun									37.200.000.000
	2) Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD dan SMP	Jumlah sekolah unggulan yang mendapat bantuan		-	21 SD, 6 SMP, 2SMA, 2 SMK	-	-	-		37.200.000.000
11.	Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD/SMP	Jumlah ruang kelas yang diperbaiki	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	2035	-	-	-	-	20.579.958.310
	Program : Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah									20.579.958.310
	2) Kegiatan Konstruksi Bangunan Sekolah	Jumlah ruang kelas yang diperbaiki		-	2035	-	-	-		20.579.958.310
12.	Pembangunan TPA	TPA Regional	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	1 TPA Regional	DPU ESDM	3.000.000.000
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									3.000.000.000
	1) Pengadaan Lahan TPA Regional	Tersedianya Lahan untuk TPA regional		-	Lahan	-	-	-		2.000.000.000
	2) Penyusunan DED TPA Regional	Jumlah DED TPA Regional yang tersusun		-	-	1 DED	-	-		1.000.000.000
13.	Penghapusan denda/sanksi keterlambatan pengurusan Akte Kelahiran	Akte Kelahiran yang dikenakan denda	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	0%	-	Disdukcapil	146.410.000
	Program : Penataan Administrasi Kependudukan									146.410.000
	1) Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat Kolektif	Jumlah akte kelahiran		1250 org	1250 org	1250 org	1250 org	1250 org		146.410.000
14.	Penuntasan Perekaman e-KTP dengan metode jemput bola	Jumlah jiwa yang direkam KTP nya	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	5000 jiwa	-	-	-	Disdukcapil	890.000.000
	Program : Penataan Administrasi Kependudukan									890.000.000
	1) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Jumlah jiwa yang direkam KTP nya		-	5000 jiwa	-	-	-		890.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Pembangunan gedung kantor BPPPT	Gedung kantor BPPPT	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	1 Gedung	-	-	BPPPT	3.375.000.000
	Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur									3.375.000.000
	1) Pembangunan Gedung Kantor BPPPT	Gedung kantor BPPPT		-	-	1Gedung	-	-		3.375.000.000
16.	Migrasi Aplikasi SIPKD ke SIMDA Keuangan	Aplikasi SIMDA	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Aktif	-	-	-	-	DPPKAD	375.000.000
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									375.000.000
	1) Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Aplikasi SIMDA		Aktif	-	-	-	-		375.000.000
17.	Pelayanan Pendapatan Daerah	Pelayanan Pendapatan Daerah Aktif	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Aktif	-	-	-	-	DPPKAD	1.137.181.000
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									1.137.181.000
	1) Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pajak dan retribusi		10 jenis pajak, 1 retribusi	-	-	-	-		60.000.000
	2) Penyampaian SPT dan DHK PBB	Jumlah SPT dan DHK PBB yang tersampaikan hingga desa		21 kec,372 desa/ kel	-	-	-	-		652.760.000
	3) Penerbitan SPT dan DHKP	Jumlah SPT dan DHKP PBB		21 kec,372 desa/ kel	-	-	-	-		268.906.000
	4) Penyelesaian dan Verifikasi Ketetapan Pajak dan Retribusi	Jumlah ketetapan Wajib Pajak		21 kec,372 desa/ kel	-	-	-	-		155.515.000
18.	Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbup tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Perbup					DPPKAD	32.365.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									32.365.000
	1) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Perbup	-	-	-	-		32.365.000
19.	Pengadaan Tanah PKL	Tanah PKL	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Bidang tanah	-	-	-	-	DPPKAD	17.422.760.000
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan									17.422.760.000
	1) Pengadaan Tanah	1 Bidang tanah		1 Bidang tanah	-	-	-	-		17.422.760.000
20.	Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Aplikasi SIMBADA	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Aktif	-	-	-	-	DPPKAD	171.713.000
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									171.713.000
	1) Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	Aplikasi SIMBADA		Aktif	-	-	-	-		171.713.000
IV	Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah									
1.	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) SKPD yang didalamnya meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Maklumat/Janji Layanan.	Dokumen SP SKPD	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	-	-	-	-	Setda	90.000.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									90.000.000
	1) Fasilitasi Penyusunan SOP, SPP dan SPM SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki SP		53 SKPD	-	-	-	-		90.000.000
2.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural dan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional.	Dokumen Evaluasi Jabatan Struktural dan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional.	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	2 Dok	-	-	-	-	Setda	174.800.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									174.800.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Evaluasi Jabatan	Jumlah Jabatan terevaluasi.		515 Jabatan	-	-	-	-		77.800.000
	2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah SKM/SKT tersusun.		SKM JFU 30 SKPD	-	-	-	-		97.000.000
3.	Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).	Perbup tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Perbup	-	-	-	-	Setda	39.400.000
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									39.400.000
	1) Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas	Perbup tentang TNDE		Perbup TNDE	-	-	-	-		39.400.000
4.	Pelaksanaan Monev <i>online</i> , untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan dan fisik APBD.	Aplikasi SIMONEVA	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	Setda	188.400.000
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									188.400.000
	1) Pengadaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Aplikasi SIMONEVA		1 Aplikasi	-	-	-	-		188.400.000
5.	Beasiswa Siswa Berprestasi SD, SMP dan SMA.	Jumlah Siswa berprestasi SD, SMP dan SMA yang memperoleh beasiswa	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	3.375 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa	4.060 siswa	Disdikpora	16.532.500.000
	Program: Wajib Belajar Sembilan Tahun									1.022.500.000
	1) Beasiswa Anak Kurang Mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin)(Pendamping)	Jumlah siswa penerima Beasiswa Anak Kurang Mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin)		900 siswa	900 siswa	900 siswa	900 siswa	900 siswa		37.500.000
	2) Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP		175 siswa	180 siswa	180 siswa	180 siswa	180 siswa		985.000.000
	Program : Pendidikan Menengah									1.010.000.000
	3) Beasiswa Kurang Mampu bagi Siswa SMA/MA dan SMK(GULKIN)(Pendamping)	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Kurang Mampu bagi Siswa SMA/MA dan SMK(GULKIN)		640 siswa	1280 siswa	1280 siswa	1280 siswa	1280 siswa		25.000.000
	4) Beasiswa Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa yang memperoleh Beasiswa Siswa Berprestasi		160 siswa	200 siswa	200 siswa	200 siswa	200 siswa		985.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan									14.500.000.000
	5) BOSDA (sekolah Negeri)	Jumlah orang yang memperoleh BOSDA (sekolah Negeri)		1500 org	1500 org	1500 org	1500 org	1500 org		14.500.000.000
6.	Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan.	Luasan lingkungan permukiman perdesaan yang ditata	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	16%	19%	22%	28%	DPU ESDM	188.400.000
	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan									188.400.000
	1) Penataan Lingkungan Permukiman di Desa Dan Perkotaan	Luasan Permukiman di desa dan perkotaan yang tertata		-	16%	19%	22%	28%	DPU ESDM	11.400.000.000
7.	Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil.	Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil.	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 Perbup	-	-	-	-	Disdukcapil	27.118.300
	Program : Penataan Administrasi Kependudukan									27.118.300
	1) Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil.	Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil.		1 Perbup	-	-	-	-		27.118.300
8.	Penyusunan regulasi di bidang Penanaman Modal.	Regulasi Bidang Penanaman Modal	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	BPMPPPT	90.000.000
	Program: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									90.000.000
	1) Penyusunan Regulasi di bidang Penanaman Modal	Jumlah draft Perbup yang disusun		1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft		90.000.000
9.	Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Kartu Jamkesda bagi masyarakat miskin	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	178.894	178.894	178.894	178.894	178.894	Dinkes	60.509.019.000
	Program : Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin									60.509.019.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin)	Jumlah masyarakat penerima layanan Jamkesda/BPJS*		178.894	178.894	178.894	178.894	178.894		60.509.019.000
10.	Jaminan Kesehatan Khusus	Jumlah warga yang memperoleh Jaminan Kesehatan Khusus	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	Dinkes	1.845.000.000
	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat									1.845.000.000
	1) Jaminan kesehatan khusus	Jumlah kader kesehatan dan atlet berprestasi yang dijamin kesehatannya		12.276	12.276	12.276	12.276	12.276		1.845.000.000
11.	Pengembangan sarana dan prasarana bidang kesehatan di BLUD RSUD Muntilan dan Puskesmas se Kabupaten Magelang.	Cakupan sarana dan prasarana bidang kesehatan di BLUD RSUD Muntilan dan Puskesmas se Kabupaten Magelang.	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes	222.623.540.000
	Program : Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya									30.623.540.000
	1) Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Jumlah Puskesmas yang dibangun		1	2	2	2	2		14.189.635.000
	2) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dibangun		6 unit	10 unit	7 unit	8 unit	15 unit		5.990.031.000
	3) Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat kesehatan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		5.200.000.000
	4) Rehab Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Jumlah rehabilitasi Puskesmas dan Jaringannya		7 unit	-	-	-	-		900.000.000
	5) Pengadaan Komputer Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Simpus Multi User	Jumlah Puskesmas melaksanakan simpus multi user		29 Puskesmas	-	-	-	29 Puskesmas		410.000.000
	6) Pengadaan kendaraan roda 4	Jumlah kendaraan roda 4 yang dibeli		-	-	-	-	5 unit		900.000.000
	7) Pengadaan kendaraan roda 2	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibeli		-	-	-	30 unit	-		533.874.000
	8) Pengadaan Tanah Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah pengadaan tanah		1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas		2.500.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata									192.000.000.000
	1) Pengadaan Tanah Rumah Sakit	Jumlah pengadaan tanah		1 lokasi	-	-	-	-		17.150.000.000
	2) Penyusunan Studi Kelayakan RSUD	Dokumen Studi Kelayakan RSUD		1 Dokumen	-	-	-	-		350.000.000
	3) Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Menjadi RS Tipe D	Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Menjadi RS Tipe D		-	1 Dokumen	-	-	-		350.000.000
	4) Pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B	Jumlah unit pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B		-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		174.150.000.000
12.	Aplikasi PATEN di seluruh kecamatan se Kabupaten Magelang.	Aplikasi PATEN di seluruh kecamatan se Kabupaten Magelang.	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Setda	130.000.000
	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH									130.000.000
	1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN		21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec		130.000.000
13.	Revisi Perda PPNS	Perda PPNS	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	1 Perda	-	-	-	Satpol PP	25.000.000
	Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan									25.000.000
	1) Revisi Perda PPNS	Jumlah Revisi Perda PPNS		-	1 Perda	-	-	-		25.000.000
14.	Pembangunan Panti Asuhan Pemerintah	Panti Asuhan Pemerintah	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	1 Panti Asuhan Pemerintah	-	Disnakersostrans	6.797.100.000
	Program : Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo									6.797.100.000
	1) Studi Kelayakan Panti Asuhan dan Taman Makam Pahlawan Pemerintah Kabupaten Magelang	Jumlah studi kelayakan panti dan TMP		-	2	-	-	-		50.000.000
	2) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Panti Sosial dan TMP	Luas Tanah yang dibeli		-	-	5 Ha	-	-		5.000.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3) Pembangunan Panti Sosial Pemerintah	Panti Asuhan yang dibangun		-	-	-	1	-		947.100.000
	4) Pengadaan Sarpras Panti Asuhan Pemerintah	Sarpras yang dibeli		-	-	-	-	1 paket		800.000.000
15.	Penegakan Perda dan Perbup	Frekuensi Penegakan Perda dan Perbup (kali)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	200	225	250	275	300	Satpol PP	3.552.336.000
	Program: Penataan Peraturan Perundang-Undangan									3.552.336.000
	1) Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Penegakan Perda		132 x	132 x	132 x	132 x	132 x		1.350.000.000
	2) Operasi Penertiban Penambang Liar	Frekuensi operasi penambang liar		96 x	96 x	96 x	96 x	96 x		984.844.000
	3) Penanganan Perkara (Non Litigasi)	Persentase penanganan perkara		-	100%	100%	100%	100%		1.217.492.000
16.	Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) di setiap desa	Jumlah KST	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	216	216	405	540	675	Satpol PP	300.000.000
	Program : Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									300.000.000
	1) Pembinaan dan Pengembangan Kader Siaga Trantib (KST)	Jumlah desa untuk KST		-	-	45 Desa	60 Desa	75 Desa		300.000.000
17.	Alih Digital Arsip Kependudukan	Aplikasi Alih Digital Arsip Kependudukan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Disdukcapil	524.979.295
	Program : Penataan Administrasi Kependudukan									524.979.295
	1) Alih Digital Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen kependudukan yang terpelihara		20.000 dok	20.000 dok	20.000 dok	20.000 dok	20.000 dok		524.979.295
18.	Pembangunan Data Center SIAK dan e-KTP pada Disdukcapil	Data Center SIAK dan e-KTP	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Disdukcapil	140.000.000
	Program : Penataan Administrasi Kependudukan									140.000.000
	1) Pembangunan Data Center SIAK dan e-KTP	Gedung Data Center		1	-	-	-	-		80.000.000
	2) Penataan dan Penyempurnaan Kelengkapan Gedung Data Center	Jumlah gedung yang tertata		-	1	-	-	-		60.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Pelayanan administrasi kependudukan melalui Mobil Keliling	Pelayanan administrasi kependudukan melalui Mobil Keliling	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Disdukcapil	500.000.000
	Program: Penataan Administrasi Kependudukan									500.000.000
	1) Pengadaan Mobil Operasional Administrasi Kependudukan	Pengadaan mobil		1 Mobil	-	-	-	-		500.000.000
	2) Pelayanan adminduk keliling	Operasional pelayanan adminduk keliling		-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		-
20.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Lelang Jabatan	Lelang Jabatan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	Sudah	Sudah	Sudah	BKD	1.080.476.870
	Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									1.080.476.870
	1) Penataan Pejabat Struktural dan Fungsional	Pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui Lelang Jabatan		-	-	Sudah	Sudah	Sudah		1.080.476.870
21.	Peningkatan Kapasitas Pejabat Struktural melalui Diklatpim	Persentase Pejabat Struktural lulus Diklatpim	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	7.122.115.000
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									7.122.115.000
	1) Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan		Jumlah peserta diklat Pim II, III, dan IV	50 org	42 org	36 org	36 org	36 org		7.122.115.000
22.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Perda yang disahkan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD	1.352.579.833
	Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									1.352.579.833
	1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan		10 Perda	15 Perda	16 Perda	18 Perda	20 Perda		1.352.579.833
23.	Reses (tatap muka dengan masyarakat)	Frekuensi Reses /tahun	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	3 x	3 x	3 x	3 x	3 x	Sekretariat DPRD	4.861.701.268
	Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									4.861.701.268
	1) Reses DPRD	Frekuensi Reses/tahun		3 x	3 x	3 x	3 x	3 x		4.861.701.268
24.	Peningkatan kapasitas petani/peternak dan pengusaha di bidang pertanian/peternakan	Jumlah pelaku utama dan usaha yang dilatih (orang)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	285	285	285	285	BPPKP	633.590.000
	Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan									633.590.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan	Jumlah peserta yang meningkat kapasitas Pengetahuan, sikap dan Keterampilan dalam usaha peternakan		-	140 org	140 org	140 org	140 org		633.590.000
25.	Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah petani organik yang dilatih (orang)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	500 org	500 org	500 org	500 org	BPPKP	2.400.000.000
	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani									2.400.000.000
	1) Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah pelaku utama yang meningkat kapasitas Pengetahuan, sikap dan Keterampilan pertanian organik		-	500 org	500 org	500 org	500 org		2.400.000.000
26.	Peningkatan Ketahanan Pangan menuju kedaulatan Pangan	Pola Pangan Harapan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	90	91	91,5	93,1	93,1	BPPKP	2.987.670.000
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan									2.987.670.000
	1) Penyusunan Analisa Data Neraca Bahan Makanan	Laporan analisa data NBM		1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		100.734.000
	2) Peningkatan dan pengembangan lumbung pangan desa/ kabupaten	Persediaan gabah di lumbung pangan		50 ton	50 ton	50 ton	50 ton	50 ton		1.825.000.000
	3) Penyusunan Alur Distribusi dan Harga Pangan Strategis	Laporan Analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis		1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		134.312.000
	4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Jumlah LDPM yang produktif		11 LDPM	11 LDPM	11 LDPM	11 LDPM	11 LDPM		125.000.000
	5) Survei Pola Pangan Harapan	Laporan analisis Pola Pangan Harapan (PPH)		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		200.000.000
	6) Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan	Peta Daerah Rawan Pangan (372 desa)		-	1 dok	-	-	-		84.000.000
	7) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Laporan hasil uji keamanan pangan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		250.000.000
	8) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Laporan analisa data situasi pangan dan gizi (SKPG)		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		268.624.000
27.	Pengembangan itik kalung sebagai ternak khas dari kabupaten Magelang	Produksi bibit itik kalung (ekor)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	86.939	88.678	90.451	92.260	94.106	Dispeterikan	3.187.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Produksi Peternakan									3.187.000.000
	1) Pelestarian SDG Itik Magelang	Jumlah bibit itik		500 ekor	-	-	-	-		75.000.000
	2) Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Pembibitan Itik Magelang	Jumlah Pembentukan/ pemberdayaan kelompok Pembibitan Itik Magelang (Kelompok)		-	2	2	4	5		955.000.000
	3) Pengembangan Itik Magelang	Jumlah penyediaan induk Itik Magelang berkualitas		2.250	2.325	2.500	4.000	4.500		2.157.000.000
28.	Menjadikan Kabupaten Magelang sebagai Sentra Benih Ikan	Produksi Benih Ikan (ekor)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	Dispeterikan	17.582.000.000
	Program : Pengembangan Budidaya Perikanan									17.462.000.000
	1) Peningkatan Kapasitas BBI Lokal	Jumlah produksi induk ikan nila, beyong, dan nilem di BBI (ek)		4.000	55.000	56.000	58.000	59.000		445.000.000
	2) Percontohan UPR (Unit Pembenihan Rakyat)	Jumlah Demplot UPR secara terpadu (Demplot)		-	3	4	4	4		485.000.000
	3) Intensifikasi Budidaya Perikanan (Inbudkan)	Jumlah produksi benih ikan pada Intensifikasi Budidaya Perikanan (Inbudkan) dari bantuan calon induk ikan (Ek)		40.000	40.000	40.000	75.000	90.000		1.410.000.000
	4) Fasilitasi Sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	Jumlah pemberian sertifikat CPIB pada pokdakan yang terfasilitasi		-	8	6	6	6		160.000.000
	5) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (pkt)		14	6	8	10	14		14.962.000.000
	Program: Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan									120.000.000
	6) Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Jumlah promosi/ jaringan pemasaran produksi perikanan		-	2	2	2	2		120.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Perhubungan di wilayah Kabupaten Magelang	Cakupan Sarana Prasarana Penunjang Perhubungan di wilayah Kabupaten Magelang (Persen)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	8,31	10,29	49,44	16,25	14,96	Dinas Perhubungan	31.369.970.120
	Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan									28.698.915.120
	1) Pembangunan Terminal Bandongan	Terminal Bandongan		1 unit	-	-	-	-		2.500.000.000
	2) Terminal OD Kaliangkrik	Terminal OD Kaliangkrik		-	-	-	-	1 unit		7.086.495.385
	3) Terminal Angkutan Barang	Terminal angkutan barang		-	-	-	-	1 unit		18.822.419.735
	4) Pembangunan Halte	Jumlah halte		-	-	-	-	9 Halte		290.000.000
	Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas									2.671.055.000
	5) Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas		142	71	70	87	351		802.209.000
	6) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang pagar pengaman jalan		545,5	257	150	328,5	287		1.709.388.000
	7) Pengecatan Zebra Cross	Jumlah titik pengecatan Zebra Cross		10	10	10	10	10		159.458.000
30.	Penanganan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bapermaspuan dan KB	886.000.000
	Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan									886.000.000
	1) Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		150 kasus	95 kasus	95 kasus	95 kasus	95 kasus		542.600.000
	2) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak	Jumlah perda Perlindungan Anak yang tersusun		-	-	1 Perda	-	-		55.700.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3) Advokasi Isu Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta advokasi isu perlindungan perempuan dan anak		280 org	150 org	150 org	150 org	150 org		287.700.000
31.	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan sarana dan prasarana pelayanan KB	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bapermaspuan dan KB	8.348.249.722
		Cakupan fasilitas pelayanan program KKB		100%	100%	100%	100%	100%		
	Program : Keluarga Berencana									8.348.249.722
	1) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana		Jumlah sarana prasarana KB yang tersedia	3 Gedung	3 Gedung	1 paket	1 paket	1 paket		6.879.349.722
	2) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi (Aseptor)		2.928	3.220	3.542	3.896	4.285		1.468.900.000
32.	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Cakupan sarana dan prasarana pasar desa	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	7%	7%	7%	7%	7%	Bapermaspuan dan KB	2.529.000.000
		Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa		20%	20%	20%	20%	20%		
	Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan									2.379.000.000
	1) Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat yang terbentuk (kelompok)		10	10	10	10	10		156.400.000
	2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana		4 pasar	5 pasar	5 pasar	5 pasar	5 pasar		1.320.700.000
	3) Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna		40 org	40 org	40 org	40 org	40 org		316.900.000
	4) Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil PNPB Mandiri Perdesaan dan PPK	Jumlah lokasi aset PNPB yang dilindungi dan dilestarikan (Kecamatan)		19	19	19	19	19		585.000.000
	Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa									150.000.000
	5) Pembentukan Desa Berdikari	Jumlah Desa Berdikari		-	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa		150.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat	Cakupan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	7.702.885.000
	Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa									6.308.712.000
	1) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Frekuensi penyelenggaraan Sarasehan dan Wahana Komunikasi Masyarakat di tingkat kecamatan		16 x	16 x	16 x	16 x	16 x		582.000.000
	2) Pengembangan Media Tradisional	Frekuensi Media Pertunjukan Rakyat		12 x	12 x	12 x	12 x	12 x		685.500.000
	3) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Tembakau	Jenis media penayangan sosialisasi		3 jenis media	3 jenis media	3 jenis media	3 jenis media	3 jenis media		503.650.000
	4) Diseminasi Informasi melalui Media Radio	Jumlah jam tayang/hari		19 jam / hari	19 jam / hari	19 jam / hari	19 jam / hari	19 jam / hari		1.201.370.000
	5) Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media Luar Ruang	Jenis media pendistribusian informasi		4 jenis media	4 jenis media	4 jenis media	4 jenis media	4 jenis media		383.642.000
	6) Koneksi Jaringan Internet	Jumlah layanan bandwidth koneksi se Kabupaten Magelang		15 Mbps	30 Mbps	45 Mbps	50 Mbps	60 Mbps		2.952.550.000
	Program : Kerjasama Informasi dan Media Massa									1.394.173.000
	7) Penerbitan Majalah Suara Gemilang	Jumlah majalah yang dicetak/ tahun (eksemplar)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		1.394.173.000
34.	Meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Magelang	Jumlah kunjungan wisata (domestik)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	4.410.074	4.876.660	5.892.611	5.968.149	6.594.051	Disparbud	21.568.016.615
	Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata									
	1) Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata	Daya tarik wisata yang dikembangkan		Telaga Bleder	-	3 obyek	3 obyek	3 obyek		5.740.228.775
	2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass	Pengelolaan Ketep Pas		1 obyek	1 obyek	1 obyek	1 obyek	1 obyek		8.708.187.840
	3) Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Daya tarik wisata yang ditangani		6 obyek	6 obyek	6 obyek	6 obyek	6 obyek		3.564.000.000
	4) Penataan Lingkungan Daya Tarik Desa			-	2 obyek	2 obyek	2 obyek	2 obyek		3.555.600.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Pengiriman delegasi kesenian sebagai bagian dari promosi wisata	Frekuensi pengiriman delegasi	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	Disparbud	1.290.000
	Program : Pengelolaan Keragaman Budaya									1.290.000
	1) Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah dan Nasional	Frekuensi pengiriman kelompok kesenian		4 x	4 x	4 x	4 x	4 x		1.290.000
36.	Penataan Struktur Industri di Kabupaten Magelang	Gedung KUMKM Center	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	1 unit	-	-	Disperinkop dan UMKM	8.750.399.117
	Program : Penataan Struktur Industri									6.750.000.000
	1) Pembangunan Gedung KUMKM Center	Gedung KUMKM Center		-	-	1 unit	-	-		6.750.000.000
	Program : Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial									2.250.399.117
	2) Pendampingan Pengembangan Produk OVOP (One Village One Product)	Jumlah produk OVOP yang terdampingi		2 OVOP	2 OVOP	2 OVOP	2 OVOP	2 OVOP		2.250.399.117
37.	Peningkatan Produksi Pertanian dan perkebunan	Luas lahan yang tersertifikasi (Ha)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	129	149	149	149	144	Distanbunhut	60.377.022.000
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan									60.377.022.000
	1) Sertifikasi Pangan Organik	Luas lahan yang bersertifikat (Ha)		30	50	50	50	45		850.000.000
	2) Sertifikasi Organik Komoditas Empon-Empon	Luas lahan yang bersertifikat (Ha)		10	10	10	10	10		375.000.000
	3) Sertifikasi Organik Komoditas Kopi	Luas lahan yang bersertifikat (Ha)		22	22	22	22	22		250.000.000
	4) Sertifikasi Organik Komoditas Kelapa	Luas lahan yang bersertifikat (Ha)		24	24	24	24	24		260.000.000
	5) Sertifikasi Sayuran Organik	Luas lahan yang bersertifikat (Ha)		3	3	3	3	3		675.000.000
	6) Sertifikasi Salak Organik	Luas lahan yang bersertifikat (Ha)		40	40	40	40	40		250.000.000
38.	Peningkatan jumlah pasar dengan kategori baik di Kabupaten Magelang	Persentase pasar kategori baik di Kabupaten Magelang (Persen)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	56,25	62,50	68,75	75	81,25	Disdagsar	328.000.000.000
	Program : Peningkatan Sarana Perdagangan									328.000.000.000
	1) Pembangunan Pasar Secang			-	1 unit	-	-	-		23.000.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Pembangunan Pasar Muntilan			-	1 unit	-	-	-		95.000.000.000
	3) Pembangunan Pasar Kaliangkrik			-	-	1 unit	-	-		90.000.000.000
	4) Pembangunan Pasar Mungkid			-	-	-	1 unit	-		100.000.000.000
	5) Pembangunan Pasar Windusari			-	-	-	-	1 unit		20.000.000.000
39.	Penataan PKL khususnya di kawasan Muntilan, Mertoyudan, Secang, Grabag, dan Salaman	Persentase PKL yang tertata (Persen)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	35	49	68	82	100	Disdagsar	1.864.113.000
	Program : Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan									1.864.113.000
	1) Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan	Jumlah anggota kelompok PKL yang dibina, jumlah pembinaan		250 PKL	250 PKL	62 PKL	83 PKL	60 PKL		411.919.000
	2) Penataan Tempat Berusaha PKL dan Asongan			150 PKL	62 PKL	83 PKL	60 PKL	75 PKL		411.000.000
	3) Pembangunan Tempat Berusaha PKL dan Asongan			-	1 unit	-	-	-		1.041.194.000
40.	Diraihnya Adipura Kota Muntilan	Adipura Kota Muntilan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	Piala Adipura	BLH	3.670.050.000
	Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									3.670.050.000
	1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Piala Adipura		Nilai 70	Nilai 71	Nilai 72	Sertifikat Adipura	Piala Adipura		625.000.000
	2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran	Jumlah kelompok penerima fasilitasi pengendalian pencemaran		3	3	4	4	5		236.050.000
	3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Cair dan Padat	Jumlah kelompok penerima sarana dan prasarana pengolahan limbah cair dan padat (DAK)		18	5	6	6	6		2.809.000.000
	Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau									1.430.913.000
	4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	Luas RTH yang ditanami (Ha)		1,4	11	14	16	18		1.430.913.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Program Menabung Air	Realisasi Program Menabung Air	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	BLH	11.892.690.000
	Program : Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam									11.892.690.000
	1) Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air	Luas daerah resapan air yang dikonservasi secara vegetative (Ha)		22	41	46	52	58		2.262.850.000
	2) Peningkatan Cadangan Air Tanah dengan Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori	Luas daerah resapan air yang dikonservasi secara sipil teknis (Ha)		0,75	0,89	0,97	1,07	1,17		2.380.419.000
	3) Penghijauan untuk Konservasi Sumber Daya Air	Luas daerah resapan air yang dikonservasi secara vegetative (Ha)		26	32	38	44	51		1.950.005.000
	4) Konservasi Bantaran Sungai	Luas bantaran sungai yang dikonservasi (Ha)		6,7	30	40	60	70		1.660.000.000
	5) Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional	Banyaknya orang/kelompok yang mendapatkan penghargaan lingkungan		4	4	4	4	4		860.000.000
	6) Penanggulangan Kerusakan Lahan untuk Mitigasi Bencana Lingkungan	Luas lahan yang dikonservasi		5	24	29	32	35		1.279.416.000
	Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup									
	7) Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk Produksi Biomassa	Luas lahan yang ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada wilayah yang berpotensi rusak "tinggi"(Ha)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		1.500.000.000
42.	Pengelolaan Limbah padat, cair, dan udara	Limbah padat, cair, dan udara terkelola dengan baik	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	BLH	1.166.000.000
	Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									1.166.000.000
	1) Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Jumlah titik pantau		-	-	-	-	-		674.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Pengendalian Limbah Cair pada Usaha/Kegiatan	Jumlah usaha dan/kegiatan yang diperiksa sampel limbahnya		10	10	10	10	10		167.000.000
	3) Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti		10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	325.000.000
43.	Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat, dan pencegahan tindak kriminal	Kondusifitas Kabupaten Magelang	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Kantor Kesbangpol	1.200.330.000
	Program : Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat									1.200.330.000
	1) Peningkatan Peran Fungsi Kominda	Jumlah anggota tim KOMINDA		28 org	28 org	28 org	28 org	28 org		697.140.000
	2) Monitoring IPOLEKSOSBUD	Jumlah desa yang dimonitor		372 desa	372 desa	372 desa	372 desa	372 desa		230.800.000
	3) Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri	Jumlah anggota tim		32 org	32 org	32 org	32 org	32 org		272.390.000
44.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	9	10	12	12	12	Kantor Kesbangpol	1.949.436.000
	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan									503.556.500
	1) Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah peserta FKUB		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org		210.000.000
	2) Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Jumlah peserta pembinaan PAKEM		55 org	55 org	55 org	55 org	55 org		168.556.500
	3) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan		75 org	75 org	75 org	75 org	75 org		125.000.000
	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan									1.445.879.500
	4) Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta bela negara		200 org	200 org	200 org	200 org	200 org		655.000.000
	5) Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi		390 org	390 org	390 org	390 org	390 org		266.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6) Sarasehan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	Jumlah peserta FPBI		125 org	125 org	125 org	125 org	125 org		154.000.000
	7) Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta FKDM		21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec		260.820.500
	8) Penguatan ManajemenTata Kelola Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta manajemen tata kelola organisasi kemasyarakatan		30 ormas	30 ormas	30 ormas	30 ormas	30 ormas		110.059.000
45.	Meningkatkan pemahaman politik di masyarakat	Kegiatan pembinaan politik daerah	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	6	8	10	12	12	Kantor Kesbangpol	635.500.000
	Program : Pendidikan Politik Masyarakat									635.500.000
	1) Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik	Jumlah peserta sosialisasi pemantapan budaya politik		-	75 org	75 org	75 org	75 org		135.000.000
	2) Peningkatan kapasitas Pengurus Parpol	Jumlah peserta		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org		500.500.000
46.	Peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	41.885	42.722	43.576	44.447	45.335	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.395.990.000
	Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									2.395.990.000
	1) Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling	Jumlah Pengunjung perpustakaan yang dilayani (orang)		41.885	42.722	43.576	44.447	45.335		868.990.000
	2) Promosi Perpustakaan	Jenis lomba yang diadakan		5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis		555.000.000
	3) Penyediaan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dibeli (Eksemplar)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		972.000.000
47.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Jumlah arsip yang dilestarikan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	554.338.000
	Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah									554.338.000
	1) Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	Jumlah arsip yang dilestarikan		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		554.338.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	RSUD Muntilan	350.110.861.164.000
	Program : Pengadaan, Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit									11.647.851.368.000
	1) Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1.500.000.000
	2) Pengembangan dan Pemeliharaan SIM RS	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		11.644.351.368.000
	3) Pengembangan dan Pemeliharaan SIM RS	Jumlah Unit Pelayanan/Ruang Terintegrasi SIMRS		10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang		2.000.000.000
	Program : Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat									338.463.009.796.000
	4) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln		338.463.009.796.000
49.	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan (Persen)	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	60	70	80	100	100	BPBD	13.150.000.000
	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam									13.150.000.000
	1) Pembentukan Desa Bersaudara (<i>Sister Village</i>)	Jumlah desa bersaudara (pasang)		3 pasang	5 pasang	5 pasang	3 pasang	3 pasang		900.000.000
	2) Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana (desa)		5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa		1.250.000.000
	3) Pembangunan Tempat Evaluasi Akhir (TEA)	Unit TEA yang dibangun		-	-	-	-	1 unit		11.000.000.000
50.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan statistic	Tersedianya dokumen perencanaan dan statistik	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA	5.235.000.000
	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah									2.435.000.000

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jenis dokumen perencanaan yang disusun		3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis		2.435.000.000
	Program : Perencanaan Tata Ruang									800.000.000
	2) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen tata ruang		-	1 dok	1 dok	-	-		800.000.000
	Program : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah									2.000.000.000
	3) Penyusunan Buku Statistik	Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten		9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis		2.000.000.000

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat pemerintah kabupaten, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat pemerintah kabupaten, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD;
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;

5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang 2015 – 2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN